

# **SKRIPSI**

## **PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT BANK RIAU KEPRI CABANG SYARI'AH PEKANBARU**

**Dajukan Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana  
Ekonomi Islam Pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hukum  
Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau**



**Disusun Oleh :**

**NURBAINA  
10625003868**

**PROGRAM S1  
JURUSAN EKONOMI ISLAM  
FAKULTAS SYARI'AH DAN ILMU HUKUM  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTAN SYARIF KASIM  
RIAU  
2011**

## ABSTRAK

Skripsi ini berjudul : **PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT. BANK RIAU KEPRI CABANG SYARI'AH PEKANBARU.**

Penelitian ini dilakukan di Pekanbaru yang berlangsung pada bulan Agustus sampai dengan Maret 2011. Adapun Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru. Dan apakah telah sesuai dengan PSAK No:105 Tahun 2009 Tentang Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*.

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No:377 Pekanbaru. Tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah untuk mengetahui Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru. Dan untuk mengetahui apakah telah sesuai dengan PSAK No:105 Tahun 2009 Tentang Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*. Sedang manfaat yang diperoleh adalah dapat mengetahui pelaksanaan Penerapan pembiayaan Akuntansi *mudharabah* nya.

Adapun metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah wawancara, dokumentasi, penelitian kepustakaan. Teknik analisa data menggunakan metode analisa *deskriptif kualitatif*, sedangkan tehnik penulisan data yaitu secara *deduktif, induktif, deskriptif analitik*. Populasi dari penelitian ini adalah seluruh karyawan terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari manejer yang seluruhnya berjumlah 5 orang. Sedangkan sampelnya ditelaah dengan teknik *purposive sampling*, dimana kepala bagian pembukuannya (*supervisor*) dan Dewan pengawas Syari'ah saja yang dijadikan *sample*.

Dari hasil penelitian yang dilakukan diperoleh kesimpulan bahwa Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* secara konsep dan teoritis yang diterapkan oleh Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru telah sesuai. Namun, dalam pencatatan kerugian yang terjadi tidak di catatat pada priode terjadi kerugian, namun diakui pada saat

bagi hasil yang harus dihitung Oleh Bank Riau. Sementara dari penyajian laporan keuangannya terlihat bahwa perusahaan belum membuat laporannya sesuai dengan PSAK No:101 Tahun 2009 Tentang Penyajian Laporan Keuangan Syari'ah . Hal ini terlihat dari penyajian beban dimana bank tidak membebankan biaya zakat yang merupakan salah satu prinsip utama dalam akuntansi syari'ah sebagai pengurang terhadap laba sebelum pajak. Bank Riau Syari'ah dalam membuat laporan keuangannya berdasarkan tahun masehi.

## DAFTAR ISI

	Halaman
<b>HALAMAN JUDUL.....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN PEMBIMBING.....</b>	<b>ii</b>
<b>PENGESAHAN SKRIPSI.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK.....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vi</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>ix</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN.....</b>	<b>xi</b>
 <b>BAB I : PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Perumusan Masalah.....	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian.....	8
D. Metode Penelitian.....	8
E. Sistematika Penulisan.....	11
 <b>BAB II : GAMBARAN UMUM PT BANK RIAU KEPRI CABANG SYARIAH PEKANBARU</b>	
A. Sejarah Singkat Perusahaan.....	13
B. Struktur Organisasi.....	16
C. Aktivitas Usaha Bank Riau Kepri Syariah.....	25
D. Visi dan Misi.....	29

### **BAB III : TINJAUAN UMUM TENTANG AKUNTANSI SYARIAH**

A. Pengertian Akuntansi Syari'ah.....	30
B. Dasar Hukum Akuntansi Syari'ah.....	32
C. Pembiayaan Mudharabah.....	35
D. Akuntansi Pembiayaan Mudharabah.....	38
1. Pengakuan dan Pengukuran Pembiayaan Mudharabah.....	38
2. Pengakuan Laba dan Rugi Mudharabah.....	42
3. Pengungkapan.....	44
5. Pengaturan Pengakhiran Mudharib.....	46

### **BAB IV : PENERAPAN AKUNTANSI PEMBIAYAAN MUDHARABAH PADA PT BANK RIAU CABANG SYARIAH**

A. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Pada Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru.....	47
B. Penerapan Akuntansi Pembiayaan Mudharabah Menurut PSAK No :105.....	54

### **BAB V : KESIMPULAN DAN SARAN**

A. Kesimpulan.....	63
B. Saran.....	64

### **DAFTAR PUSTAKA**

### **LAMPIRAN**

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang Masalah**

Pesatnya pertumbuhan bisnis dalam berbagai bidang di Indonesia maupun di dunia mendorong adanya kebutuhan yang tinggi akan akuntansi. Adanya kebutuhan ini merupakan implikasi yang wajar.<sup>1</sup> Hal ini ditandai oleh berkembangnya intitusi keuangan, seperti bank, asuransi, pasar modal, pengadaan.

Akuntansi adalah seperangkat pengetahuan yang berupa alat dan seni untuk mencatat dan mengelompokkan dan mengiktisarkan serta menafsirkan hasil transaksi keuangan yang menghasilkan konsep, prinsip, standar, prosedur, dalam rangka menyediakan informasi yang berarti sebagai pertanggungjawaban manajemen kepada pihak-pihak yang berkepentingan dan diolah dalam sebuah sistem.<sup>2</sup>

Setiap pegawai dalam perusahaan dari level yang paling bawah hingga manajer dan pemilik perusahaan sangat memiliki keterkaitan dengan bidang Akuntansi. Semakin tinggi kedudukan seseorang dalam perusahaan maka semakin membutuhkan informasi yang dihasilkan oleh bidang akuntansi. Akuntansi juga memberikan informasi kepada pihak-pihak yang berkepentingan untuk

---

<sup>1</sup> Sri Nurhayati, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009, h.1.

<sup>2</sup> Siti Sholeha, *Perbandingan Persepsi Atasan pada Organisasi Bisnis dan Nirlaba di Pekanbaru Terhadap Kemampuan Intelektual dan Emosional Sarjana Akuntansi FEKONSOS*, (Pekanbaru : Skripsi Fekonsos, 2010), h.13.

mengetahui kinerja ekonomi dan kondisi perusahaan.<sup>3</sup> Namun kaitannya dengan syari'ah, maka seorang akunting harus memiliki 4 sifat dasar dalam melakukan perhitungan-perhitungan, yakni kejujuran, keadilan, kebijakan, dan kepatuhan terhadap nilai-nilai syari'ah yang berimplikasi pada sebuah tanggung jawab, bukan hanya kepada atasan dan masyarakat yang terkait tetapi ganjaran Allah Swt., yakni mengandung konsekuensi pertanggungjawaban dunia dan akhirat.<sup>4</sup>

Di Indonesia kewajiban melakukan pembukuan setiap perusahaan di dasarkan pada Kitab Undang-Undang Hukum Dagang (KUHD) pasal 6 yang berbunyi: Tiap-tiap orang yang melakukan/menjalankan perusahaan menyelenggarakan pembukuan perusahaan, sehingga diketahui segala hak dan kewajibannya". Tujuan yang akan dicapai adalah untuk memperoleh informasi tentang transaksi keuangan dan transaksi barang agar dapat ditentukan dengan tepat kebijakan perusahaan selanjutnya.<sup>5</sup>

Akuntansi dalam konsep Islam sebagai kumpulan dasar-dasar hukum yang baku dan permanen, yang disimpulkan dari sumber-sumber hukum Islam dan dipergunakan sebagai aturan oleh seorang akuntan dalam pekerjaannya, baik dalam pembukuan, analisis, pengukuran, pemaparan, maupun penjelasan. Adapun landasan utama yang dijadikan dasar hukum akuntansi syari'ah adalah :

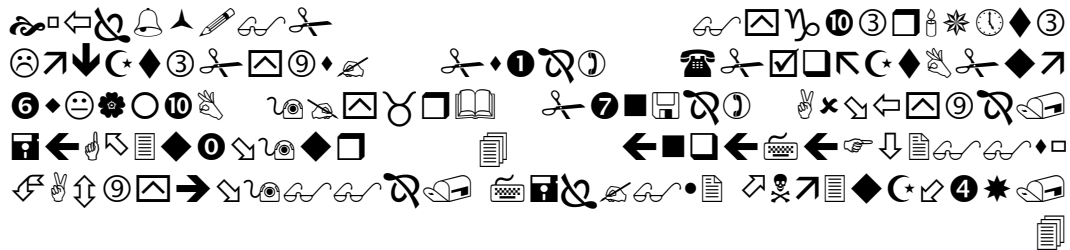
Firman Allah SWT dalam al-Qur'an sebagai pedoman pembukuan, dijelaskan dalam Surah Al-Baqarah ayat 282 yang berbunyi :

---

<sup>3</sup> Niswonger & Warren & Reves & Fess, *Prinsip-Prinsip Akuntansi*, (Jakarta : Erlangga, 1999, h.6.

<sup>4</sup> Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta : Renaisan, 2005), h.14.

<sup>5</sup> Yadiati & Wahyudi, *Pengantar Akuntansi*, (Jakarta : Kencana Perdana Media Group, 2008), h.23



Artinya “Hai orang-orang yang beriman, apabila kalian melakukan muamalat atau transaksi secara tidak tunai untuk waktu yang telah ditentukan, maka catatlah (bukukanlah),...”.<sup>6</sup>

Keberadaan Akuntansi dalam sebuah lembaga keuangan atau transaksi menjadi wajib adanya. Karena melalui akuntansilah, seseorang dapat mengetahui secara baik dan benar laporan keuangan terhadap transaksi, neraca, atau laba rugi yang pernah dilakukan.<sup>7</sup>

Jika dilihat dari cara menentukan harga, bank dibagi dalam dua jenis, yaitu bank yang berdasarkan prinsip konvensional dan bank yang berdasarkan prinsip syari’ah. Hal utama yang menjadi perbedaan antara kedua bank ini adalah dalam penentuan harga, baik untuk harga jual maupun untuk harga beli. Bank konvensional menentukan harga selalu didasarkan kepada bunga, sedangkan bank syari’ah kepada konsep Islam yaitu kerjasama dalam skema bagi hasil, baik untung maupun rugi.<sup>8</sup>

Salah satu jasa bank riau syari’ah yang merupakan sumber pendapatan dan keuntungan terbesar adalah pembiayaan, sistem pembiayaan memiliki peranan yang penting dalam mempertahankan aktifitas bisnis, dimanapun bisnis itu beroperasi. Pembiayaan erat hubungannya dengan membutuhkan dan

<sup>6</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur’an dan terjemahan*, ( Jakarta : Syamil Qur’an, 2007), Al-Baqarah : 282

<sup>7</sup> Hasbi Ramli, *Op.cid.*, h.20.

<sup>8</sup> Karim, Adiwarman, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta:Raja Grafindo Persada, 2008), h.205.



pengadaan barang modal, hal yang patut dibanggakan Bank Riau syari'ah telah melakukan fungsi intermediasi perbankan dengan sangat bagus.<sup>9</sup>

Dalam operasionalnya, transaksi bank riau syari'ah haruslah bermanfaat, sehingga menimbulkan nilai tambah dari setiap pembiayaan berbasis syari'ah, yaitu (1) bebas bunga, (2) prinsip bagi hasil dan resiko, (3) perhitungan bagi hasil tidak dilakukan dimuka, hanya nisbah bagi hasilnya yang ditentukan dimuka. Berbeda dengan kredit konvensional yang memperhitungkan suku bunga dimuka, bank syari'ah menghitung hasil setelah periode akuntansi berakhir. Hal ini berarti dalam pembiayaan syari'ah pembagian hasil dilakukan setelah ada keuntungan riil, bukan berdasarkan keuntungan spekulatif.<sup>10</sup>

Namun demikian, jika dilihat lebih jauh lagi, khususnya terkait dengan komposisi pembiayaan di bank Riau syari'ah masih kurang dari apa yang diharapkan, keadaan ini sesuai dengan laporan direktorat perbankan syari'ah Bank Indonesia yang menunjukkan bahwa porsi pembiayaan berbasis *profit and loss sharing* (PLS) relative kecil yaitu 5,39% untuk pembiayaan *murabahah* 15,35%. Rendahnya porsi pembiayaan berbasis *mudharabah* terkait dengan belum siapnya bank, bahwa pembiayaan *mudharabah* memiliki resiko yang sangat tinggi dibandingkan dengan pembiayaan lainnya yang berbasis *murabahah*, *salam*, *istisna* dan lain-lain.

Dilihat dari sisi masyarakat pengguna bahwa banyak kecurangan yang dilakukan oleh masyarakat kita dalam pelaporan keuangan, sementara

---

<sup>9</sup> Muhammad, *Manajemen Pembiayaan Mudharabah di Bank Syariah*, (Jakarta: Raja Grafindo, 2007), h.191.

<sup>10</sup> Muljaman, *Penerapan Metode Bagi Hasil Mudharabah dalam Menentukan Tingkat Pendapatan Perusahaan Bank Syari'ah Mandiri*, (Pekanbaru: Skripsi FEUNRI, 2005), h.12.

pembiayaan *mudharabah* menuntut kejujuran, amanah antara kedua belah pihak.<sup>11</sup> Utamanya adalah pihak pengguna dana atau nasabah (*Mudharib*).

Rendahnya pembiayaan *mudharabah* merupakan permasalahan penting yang perlu dibahas. Berbagai permasalahan dan solusi yang tepat perlu dicari untuk meningkatkan pembiayaan bagi hasil perbankan syariah. Rendahnya pembiayaan bagi hasil cenderung merupakan masalah yang multi dimensi yang telah terjadi sejak lama dan tidak ada kecenderungan untuk berubah.<sup>12</sup> Implikasi dari tingginya pembiayaan non bagi hasil ini adalah terbentuknya persepsi paplik bahwa perbankan syari'ah hampir tidak ada bedanya dengan perbankan konvensional.

Persepsi yang demikian akan membentuk suatu resiko reputasi tersendiri yang dikawatirkan akan menimbulkan sinisme dikalangan masyarakat bahwa bisnis perbankan syari'ah hanya merupakan pergantian nama saja, sedangkan pola fakir pelakunya tetaplah konvensional. Permasalahan juga semakin penting karena kondisi yang demikian juga terjadi di negara-negara yang menerapkan sistem perbankan syari'ah, terutama di negara-negara yang menerapkan dua bank, seperti di Indonesia, Banglades, dan Malaysia.

PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru merupakan Usaha Unit Syari'ah, salah satu pendapatannya berasal dari pembiayaan *mudharabah*. Bank Riau Kepri Syari'ah melakukan perhitungan bagi hasil *mudharabah* dengan para nasabah nya dengan metode bagi pendapatan (*revenue sharing*).<sup>13</sup> Berdasarkan pencatatan transaksi akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Riau Syariah,

---

<sup>11</sup> *Ibid.*

<sup>12</sup> Muhammad, *Loc.cit.*

<sup>13</sup> Dyah Kumala Trisnaeni, Pegawai, (Wawancara, Tanggal 10 Oktober 2010).

saat terjadi kerugian tidak dicatat pada priode terjadinya kerugian, namun diakui pada saat bagi hasil. Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No:105 tentang pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah*, Jika terjadi pembiayaan *mudharabah* yang melewati satu priode pelaporan maka keuntungan pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat terjadinya hak bagi hasil sesuai dengan nisbah yang disepakati, dan kerugian yang terjadi diakui pada priode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *Mudaharabah*.<sup>14</sup>

Permasalahan lain yang ditemukan adalah, berdasarkan PSAK 105, pada prinsipnya dalam pembiayaan *mudharabah* tidak boleh ada jaminan atas modal, agar pengelola dana tidak melakukan penyimpangan, pemilik dana dapat meminta jaminan dari pengelola dana atau pihak ketiga. Bank Riau Syari'ah masih menjadikan adanya jaminan atau agunan sebagai salah satu syarat untuk mendapatkan pembiayaan dari pihak bank syari'ah.<sup>15</sup> Sementara, ketika bank sebagai *mudharib* atau pengelola dana, nasabah sebagai *shahibul mall* tidak memberikan syarat demikian pada bank. Dari permasalahan ini adanya ketidakadilan, padahal salah satu prinsip dasar bank syari'ah adalah keadilan.

Dari hasil wawancara dengan salah satu nasabah Bank Riau Syari'ah Pekanbaru yang melakukan transaksi dengan akad *mudharabah* dimana pihak bank meminta syarat-syarat kepada nasabah tersebut antara lain : Legalitas pendirian dan izin usaha seperti Foto copy akta pendirian usaha, foto copy surat izin usaha, NPWP, daftar dokumen jaminan seperti daftar jaminan, surat

---

<sup>14</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat 2007 ),h.3

<sup>15</sup> Adi Rahmat, Pegawai, (Wawancara,Tanggal 29 Oktober 2010).

pernyataan dari pemilik barang jaminan. Dokumen keuangan seperti laporan keuangan perusahaan.<sup>16</sup>

Adapun jaminan untuk pembiayaan *mudharabah* di Bank Riau Syari'ah adalah wajib, bentuk jaminan bisa berupa benda fisik maupun non kebendaan seperti personal *warranty* (jaminan orang yang berbentuk nama baik atau lainnya). Nilai benda yang dijaminakan harus lebih besar dari jumlah nominal pembiayaan yang dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

Berdasarkan identifikasi permasalahan di atas, penulis sangat tertarik untuk melakukan penelitian tentang penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* tersebut pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru, penulis akan menuangkannya dalam sebuah laporan skripsi dengan judul **“Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru”**).

## **B. Rumusan Masalah**

Agar terarahnya penelitian ini dan tidak terjadi interpretase yang keliru terhadap hasil penelitian, maka penulis memfokuskan masalahnya sebagai berikut

1. Bagaimana Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru?
2. Apakah Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* sudah sesuai menurut Standar Akuntansi Keuangan No: 105 ?

---

<sup>16</sup> Malasari, *Nasabah*, (Wawancara, Tanggal 12 Juni 2010).

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

1. Tujuan yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:
  - a. Untuk mengetahui penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru.
  - b. Untuk Mengetahui penerapan pembiayaan *mudharabah* sudah sesuai dengan standar akuntansi keuangan no: 105 pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru.
2. Manfaat penelitian :
  - a. Bagi penulis, sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan pendidikan pada Program S1 pada Fakultas Syari'ah dan Ilmu Hikum Jurusan Ekonomi Islam Pada Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Qasim Riau.
  - b. Penelitian ini juga dapat dijadikan sebagai referensi bagi pihak manajemen PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru terutama dalam penerapan akuntansi syari'ah.
  - c. Penelitian ini dapat dijadikan referensi bagi peneliti lainnya yang berminat melakukan kajian pada bidang yang sama serta hasil penelitian ini juga dapat memberikan kontribusi terhadap perkembangan ilmu pengetahuan secara umumnya

### **D. Metode Penelitian**

Dalam melakukan penelitian dan analisis masalah yang berhubungan dengan penulisan skripsi, metode yang digunakan sebagai berikut :

## 1. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru yang berlokasi di Jl. Jenderal Sudirman No:377 Pekanbaru. Berdasarkan wawancara yang pernah penulis lakukan dengan pimpinan cabang terindikasi permasalahan-permasalahan tentang penerapan akuntansi pada bank tersebut sebagaimana yang disampaikan pada bagian latar belakang.

## 2. Subjek dan Objek Penelitian

- a. Subjek adalah kepala bagian pembukuan dan karyawan Pada Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru.
- b. Objeknya adalah Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Pada Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru.

## 3. Populasi dan Sample

Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini adalah seluruh karyawan terkait dengan penelitian ini yang terdiri dari Manajer seluruhnya berjumlah 5 orang, sedangkan sample nya ditelaah dengan teknik *Purposive Sampling*, dimana kepala bagian pembukuannya (Supervisor) dan Dewan Pengawas Syari'ah saja yang dijadikan sample.

## 4. Jenis dan Sumber Data

### a. Data Primer

Data primer adalah data yang di dapatkan dari sumber pertama baik dari individu maupun perorangan. Dalam hal ini data yang diperoleh dengan melakukan wawancara dengan Kepala bagian Pembukuan (Supervisor) Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru.

b. Data Skunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari pihak yang lain yang telah dipublikasikan dalam hal ini dokumen-dokumen ataupun data lainnya terutama yang berhubungan dengan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*.

5. Teknik pengumpulan data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode pengumpulan data sebagai berikut :

- a. Wawancara yaitu melakukan wawancara langsung atau melakukan tanya jawab dengan kepala bagian pembukuan mengenai hal-hal yang berhubungan dengan penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* di bank tersebut.
- b. Observasi yaitu melakukan pengamatan langsung bagaimana kegiatan yang terjadi di bank tersebut dan melakukan pencatatan yang dianggap perlu apabila terjadi perbedaan konsep yang ada antara bank yang bersangkutan dengan teori yang ada.
- c. Dokumentasi yaitu mengumpulkan data-data atau arsip yang berhubungan dengan masalah yang diteliti seperti data keuangan dan struktur organisasi.
- d. Penelitian Pustaka yaitu dengan memperoleh berbagai informasi dari berbagai referensi seperti buku-buku yang berhubungan dengan masalah Dokumentasi yang diteliti.

6. Teknik Analisa Data

Analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah *deskriptif kualitatif* yaitu metode yang memberikan gambaran secara umum dan sistematis, faktual

dan akurat tentang objek penelitian dengan meneliti dan membahas data yang ada untuk di analisis, kemudian membandingkan antara kenyataan yang terdapat diperusahaan dengan teori yang telah dipelajari dan diambil kesimpulan

## 7. Teknik Penulisan

- a. Metode *Deduktif* adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah umum, kemudian dianalisa dan diambil kesimpulan secara khusus.
- b. Metode *Induktif* adalah suatu uraian penulisan yang diawali dengan menggunakan kaedah-kaedah khusus, kemudian dianalisis dan diambil kesimpulan secara umum.
- c. Metode *Deskriptif* adalah setelah semua data sudah berhasil terkumpul, maka penulis menjelaskan secara rinci dan sistematis sehingga dapat tergambar secara utuh dapat dipahami secara jelas kesimpulan akhirnya

## E. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran secara menyeluruh mengenai pembahasan ini dan mudah memahaminya, maka penulis menguraikan, memaparkan secara singkat isi masing-masing bab sebagai berikut :

**BAB I :** Bab ini merupakan pendahuluan yang menguraikan tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, metode penelitian serta sistematika penulisan.

**BAB II :** Pada bab ini penulis akan menguraikan tentang gambaran umum objek penelitian, yaitu tentang sejarah singkat perusahaan, struktur organisasi perusahaan, aktifitas perusahaan serta visi misi perusahaan



BAB III : Pada bab ini membahas landasan teoritis yang mendukung pembahasan masalah untuk dapat melakukan pembahasan terhadap penelitian lebih lanjut. Meliputi : Pengertian dan Dasar Hukum Akuntansi Syariah, Konsep dan Tujuan Akuntansi Syariah, Prinsip dan Ciri-ciri Umum Akuntansi Syari'ah, Akuntansi *Mudharabah*.

BABIV: Pada bab ini memaparkan hasil penelitian tentang penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* pada Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru dan Pembahasan.

BAB V : Pada bab ini merupakan bab terakhir dari penulisan skripsi yang menguraikan tentang kesimpulan dan saran terhadap hasil penelitian yang diharapkan memberikan manfaat bagi semuanya khususnya penulis dan perusahaan.

## **BAB II**

### **GAMBARAN UMUM PT. BANK RIAU KEPRI CABANG SYARI'AH PEKANBARU**

#### **A. Sejarah Singkat Perusahaan**

Beroperasinya PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah tidak hanya dilandasi dengan adanya fakta bunga bank haram pada akhir tahun 2003 dari Majelis Ulama Indonesia, namun juga disokong oleh beberapa faktor. Salah satu faktor yang memungkinkan diimplementasikannya PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru dari sisi regulasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No.10 tahun 1998 tentang perubahan Undang-Undang No.7 tahun 1992 tentang perbankan telah memberikan peluang bagi bank umum Konvensional untuk ikut serta menangani transaksi Perbankan Syari'ah.

Beberapa faktor lainnya adalah Aspek Marketing, dimana PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru juga mempunyai potensi pasar yang cukup besar di Riau mengingat mayoritas penduduk Riau beragama Islam. Selanjutnya Aspek Syari'ah, dimana masih banyak kalangan ummat Islam yang enggan berhubungan dengan pihak konvensional yang menggunakan sistem riba. Dari beberapa pengalaman terbukti bahwa perbankan syari'ah memiliki berbagai keunggulan dalam mengatasi dampak krisis ekonomi beberapa waktu yang lalu.

Beberapa aspek diatas memungkinkan beroperasinya PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru untuk memenuhi kebutuhan segmen masyarakat yang memberikan alternatif pilihan kepada masyarakat baik yang sudah menjadi nasabah bank Riau maupun yang belum.

Pendirian PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru diawali dengan melakukan restrukturisasi organisasi PT. Bank Riau dengan membentuk Unit Usaha Syariah (UUS) melalui surat keputusan Direksi BPD Riau No. 44/KEPDIR/2002. Pada tanggal 01 Oktober 2002. Prestrukturisasi organisasi ini kala itu dilakukan juga untuk mengatasi perubahan Sistem Teknologi Informasi PT. Bank Riau yang telah Online serta terjadinya perubahan bentuk Badan Hukum dari Perusahaan Daerah (PD).

Akselerasi pendiri PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah dipercepat dengan pembentukan Tim Pengembangan Unit Usaha Syari'ah Bank Riau Syari'ah dengan SK Direksi PT. Bank Riau No. 39/ KEPDIR/ 2003. Seiring dengan terbentuknya tim ini maka unit Usaha Syari'ah (UUS) sebagai koordinator pendiri PT. Bank Riau Syari'ah kepulauan Riau bekerja sama dengan sebuah konsultan perbankan syari'ah. Pendamping oleh konsultan ini dilakukan dalam hal rekrutmen sumber daya insani baik internal maupun eksternal, marketing research, training, simulasi serta penyusunan standar operasional dan prosedur. Kesiapan sumber daya insani juga dibekali secara insentif dengan pelatihan, training, seminar perbankan syariah yang dilaksanakan oleh berbagai lembaga kala itu.

Pengajuan izin prinsip pendirian PT. Bank Riau Syari'ah Kepulauan Riau ke Bank Indonesia diajukan pada tanggal 29 Januari 2004. Perstujuan dari Bank Indonesia didapatkan tanggal 27 Februari 2004 melalui surat BI No. 6/7/Dpbs/Pbr KBI Pekanbaru. Sebelum izin prinsip ini diajukan, PT. Bank Riau Syari'ah Kepulauan Riau juga melakukan berbagai hal untuk memuluskan langkah dalam

pendirian PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah termasuk rehab gedung untuk kantor cabang syariah dan UUS, Pengurusan izin operasional dikirim ke Bank Indonesia tanggal 21 Mei 2004. Izin operasional diterima pada bulan Juni 2004 yang memungkinkan untuk mulai beroperasinya PT. Bank Riau Syariah Kepri.

Pada tanggal 1 & 22 Juli 2004 dilaksanakan *Soft dan Grand Opening* PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru yang kala itu dihadiri Deputi Gubernur Bank Indonesia Maulana Ibrahim dan Gubernur Riau HM. Rusli Zainal serta ketua DPRD Provinsi Riau Drh. Chaidir MM. PT. Bank Riau Syari'ah Kepri Tanjung Pinang sebagai cabang kedua mulai beroperasi sejak tanggal 17 Februari 2006 diresmikan oleh Wakil Gubernur Provinsi Riau Bpk. HM Sani.

Sampai bulan Desember 2007 PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah telah memiliki 2 kantor cabang yaitu di Pekanbaru dan Tanjung Pinang serta satu kantor kas pimpinan Muhammadiyah Pekanbaru di Jl. KH. Ahmad Dahlan Pekanbaru serta delapan kedai layanan Syariah (KLS).<sup>1</sup>

Pada tanggal 25 Mei 2009 Wakil Bupati Inhil Rosman Malomo didampingi Direktur Utama Bank Riau Erzon membuka secara resmi beroperasinya Bank Riau Syari'ah cabang Tembilahan jalan Sudirman dan Bank Riau Syari'ah Cabang pembantu Guntung Kecamatan Kateman. Dalam sambutannya, Wakil Bupati sangat menyambut baik kehadiran PT. Bank Riau Syari'ah di Kota Tembilahan sebagai institusi perbankan yang berbasis Islami karena mayoritas masyarakat Inhil, khususnya Kota mendukung perekonomian masyarakat.

---

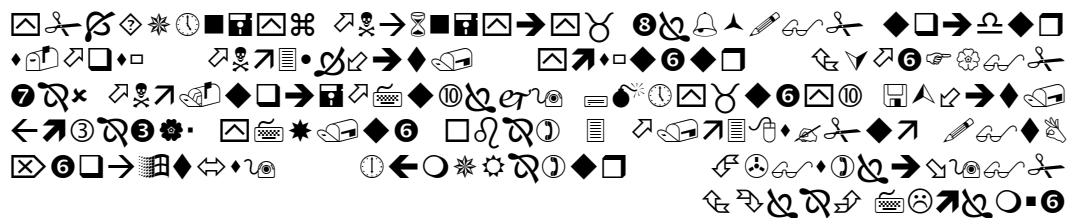
<sup>1</sup> *Company Profit PT. Bank Riau Syariah, Per 30 September 2001. h.1*

## B. Struktur Organisasi

Organisasi adalah sekelompok orang (dua atau lebih) yang secara formal dipersatukan dalam suatu kerjasama untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

Struktur organisasi adalah susunan komponen-komponen (unit-unit kerja) dalam organisasi. Struktur organisasi menunjukkan adanya pembagian kerja dan menunjukkan bagaimana fungsi-fungsi atau kegiatan-kegiatan yang berbeda-beda tersebut diintegrasikan (koordinasi). Selain dari pada itu stuktur organisasi juga menunjukkan spesialisasi-spesialisasi pekerjaan, saluran perintah dan penyampaian laporan.<sup>2</sup>

Struktur organisasi sangatlah perlu, sebagaimana firman Allah SWT yang dijelaskan dalam surat Al-an'am : 165.<sup>3</sup>



Yang artinya dan dialah yang menjadikan kamu penguasa-penguasa di bumi dan dia meninggikan sebagian kamu atas sebagian (orang lain) beberapa derajat, untuk mengujimu tentang apa yang diberikan kepadamu. Sesungguhnya tuhanmu amat cepat siksaannya dan sesungguhnya dia Maha Pengampun lagi maha penyayang. (An-an'am : 165)

Dalam ayat di atas dikatakan, Allah meninggikan seseorang diatas orang-orang lain beberapa derajat.” Hal ini menjelaskan bahwa dalam mengatur

<sup>2</sup> Adiwarman Karim, *Ekonomi Islam*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2001). h. 30

<sup>3</sup> Departemen Agama RI, *Al- Qur'an dan terjemahan*, ( Jakarta : Syamil Qur'an, 2007) Al-An'am : 165.

kehidupan dunia, peran manusia tidak akan sama. Kepintaran dan jabatan seseorang tidak akan sama. Sesungguhnya struktur itu Sunnatullah.<sup>4</sup>

Setiap perusahaan mempunyai struktur organisasi, baik pada perusahaan yang berskala besar maupun perusahaan yang bertaraf nasional maupun Internasional. Struktur organisasi perusahaan merupakan suatu kerangka usaha dalam melaksanakan pekerjaan-pekerjaan yang akan dilakukan organisasi, Dapat dianggap sebagai wadah untuk mencapai tujuan tertentu, mengetahui kedudukan dan wewenang, tugas dan fungsi serta tanggung jawabnya, sistem komunikasi dan bagaimana sistem internal kontrol dijalankan oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah sebagai suatu organisasi dalam usaha serta kegiatannya, maka telah dirumuskan aturan-aturan pembagian tugas, wewenang dan tanggung jawab setiap personil maupun bagian-bagian yang secara bersama untuk mencapai tujuan yang telah direncanakan. Untuk lebih jelasnya struktur organisasi yang terdapat pada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru dapat dilihat pada gambaran struktur organisasi di lampiran I.

#### Tugas dan Wewenang

Dalam melaksanakan fungsi Bank, berdasarkan keputusan Direksi oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru No.22/ Kepdir/1995 tentang susunan organisasi dan tata kerja oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru maka berikut ini dapat diuraikan tentang tugas dan pokok dan garis besar pekerjaan sebagai berikut :<sup>5</sup>

---

h.6. <sup>4</sup> Bambang R. Rustam, *Perbankan Syariah*, (Pekanbaru : Mumtaz Cendikia Press, 2005)

<sup>5</sup> *Manual Organisasi PT. Bank Pembangunan Daerah Riau*

### **1. Dewan Komisaris**

Dewan Komisaris terdiri dari tiga orang atau lebih yang dipimpin oleh seorang komisaris utama, bertugas dalam pengawasan interen Bank Syari'ah, mengarahkan pelaksanaan yang dijalankan oleh direksi agar tetap mengikuti kebijaksanaan perseroan dan ketentuan yang berlaku.

### **2. Direksi**

Direksi yang terdiri dari seorang direktur utama dan seorang lebih direktur, bertugas dalam memimpin dan mengawasi kegiatan bank syariah sehari-hari, sesuai dengan kebijaksanaan umum yang telah disetujui oleh dewan komisaris dalam RUPS.

### **3. Divisi Usaha Syari'ah**

Menjabarkan secara operasional perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian atas aktifitas yang berhubungan dengan hukum dan ketentuan perbankan syariah yang berlaku serta *Monitoring* terhadap operasional kantor cabang syariah.

Tugas -Tugas Pokok :

- a. Menyusun rencana kerja anggaran tahunan dan melakukan *Monitoring* serta pengendalian atas pelaksanaan.
- b. Menyelenggarakan,
- c. Mengendalikan, mengadministrasikan dan membuat laporan pelaksanaan Rencana Kerja Anggaran Tahunan Divisi Usaha Syariah
- d. Menyusun, Melaksanakan, dan mengembangkan sistem dan prosedur pembiayaan, investasi dan operasional syariah serta strategi pengembangan Bisnis Usaha syariah.

- e. Merumuskan kebijaksanaan dan pengarahan direksi dalam suatu intruksi ketetapan, Keputusan dan prosedur tertulis sebagai pedoman Sumber Daya Insani dilingkungan divisi usaha syari'ah.
- f. Menghitung kebutuhan modal usaha syari'ah
- g. Menganalisis pangsa pasar produk dan jasa usaha syari'ah
- h. Melaksanakan analisis resiko yang mungkin terjadi dalam operasional yang lain.

#### **4. Dewan Pengawas Syari'ah**

Dewan pengawas syari'ah adalah badan independen yang ditempatkan oleh Dewan Syari'ah Nasional pada Bank Anggota Dewan Pengawas Syari'ah terdiri dari sebanyak-sebanyaknya lima orang dan sekurang-kurangnya tiga orang, serta salah seorang diantaranya ditunjuk sebagai ketua. Tugas dari Dewan Syari'ah ini adalah memberikan fatwa agama terutama dalam produk-produk bank Syari'ah, kemudian bersama dewan komisaris mengawasi pelaksanaannya.

#### **5. Pimpinnan Cabang**

- a. Bertanggung Jawab dalam hal pengelolaan cabang dalam mengimplementasikan kebijakan sesuai target (anggaran).
- b. Menetapkan strategi pencapaian anggaran termasuk pengembangan SDM cabang
- c. Menetapkan kebijakan dalam menjalankan pimpinan dan pengurusan
- d. Mengatur ketentuan-ketentuan tentang kepegawaian perseroan termasuk penetapan gaji, pensiun, dan jaminan hari tua dan penghasilan lain-lain bagi pegawai perseroan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



- e. Menguasai, memelihara, dan mengurus kekayaan perseroan.
- f. Mengupayakan pemberian pembiayaan yang berkuwalitas tinggi
- g. Memantau hasil audit cabang dan mengambil tindakan koreksi bila diperlukan
- h. Dapat memberikan suasana kerja yang harmonis dan kondusif sehingga dapat meningkatkan.

#### **6. Pimpinan Bidang Operasional**

- a. Mengepali/ membawahi bagian layanan bank dan kas serta bagian operasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh kegiatan bagian tersebut
- b. Berusaha menekan biaya operasi kantor cabang seefisien dan selektif mungkin
- c. Melakukan supervice dan koordinasi dengan subordinasi dibawah
- d. Memonitori transaksi harian dan memberikan masukan kepada bagian yang terkait.

#### **7. Bagian Layanan Kas**

- a. Unit Pelayanan Nasabah
  - 1. Membawahi bagian layanan bank dan kas serta bagian operasi dan bertanggung jawab terhadap seluruh bagian pada bagian tersebut.
  - 2. Mengelola dan mengusahakan kegiatan pelayanan informasi dan pelayanan nasabah berjalan lancar, efektif, efisien sesuai dengan prosedur yang telah ditetapkan.
- b. Asisten Rekening dan Jasa, Kas dan Teller
  - 1. Menerima pembukaan rekening tabungan, giro, deposito, dan tabungan haji.

2. Mengusahakan kegiatan pelayanan informasi dan pelayanan nasabah berjalan lancar, efektif dan efisiensi sesuai dengan prosedur kerja yang telah ditetapkan.
3. Menerima dan membayar uang tunai, baik berupa cek/biyet giro dari nasabah dan pihak lain setelah memastikan kebenarannya.
4. Menyimpan dan memelihara dana tunai selama jam operasi kas dan sesudahnya.
5. Menyerahkan kepada bagian seksi dana (uang tunai) yang melebihi batas simpanan yang diperbolehkan.
6. Menyimpan informasi, mengenai data-data nasabah bagi pihak yang tidak berkepentingan.

## **8. Bagian Operasional**

- a. Sebagai bagian yang bertugas mensupport semua kegiatan operasional bank yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang masing dalam ruang lingkup dan fungsi sarana dan logistik.
- b. Memeriksa dan memastikan bahwa kebersihan dan keamanan gedung dalam keadaan terjaga dan terpelihara dengan baik.
- c. Memonitor semua inventaris kantor dan memastikan kelayakan pakai atas investasi tersebut.
- d. Secara rutin memeriksa dan mengajukan usaha untuk pengadaan alat tulis kantor dan barang cetak.

- e. Melaksanakan *Up Date* persediaan materai, perangko, cek, bilyet giro, sehingga diharapkan tidak akan kehabisan stok khusus untuk komoditi tersebut.
- f. Melaksanakan dan mengendalikan saldo kas kecil sehingga diharapkan tetap dibawah limit.
- g. Senantiasa memonitor pembebasan dari kantor pusat dan cabang lain atas biaya-biaya yang timbul dan responnya segera.
- h. Memastikan bahwa sehingga anggota satpam, supir, clening servis hadir tepat waktu, serta memeriksa buku kehadiran.
- i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh atasan langsung sepanjang masih dalam lingkup dan fungsi pelaksanaan kliring.

## **9. Unit Pemasaran Syariah**

- a. Meneliti permohonan kredit setelah perjanjian kredit dinyatakan efektif.
- b. Mengawasi penggunaan kredit dan mengikuti perkembangan perusahaan nasabah.
- c. Memonitor dan mengawasi terpenuhinya pernyataan-pernyataan dalam perjanjian kredit dan jaminan bank.
- d. Meneliti dan menilai laporan dan perkembangan perusahaan nasabah baik fisik maupun financial.
- e. Membina nasabah guna perkembangan usahanya baik lisan maupun tertulis.
- f. Melaksanakan usaha penagihan pembiayaan sesuai dengan perjanjian pembiayaan yang dilakukan secara musyawarah maupun melalui Badan penyelesaian Sengketa (BPS).

- g. Menyusun laporan-laporan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang berlaku.
- h. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diserahkan oleh pimpinan cabang.

#### **10. Bagian Pengelolaan Pembiayaan**

- a. Sebagai pelaksana tugas-tugas pada unit operasi pembiayaan sesuai dengan ketentuan-ketentuan yang telah digariskan.
- b. Melakukan pemeriksaan atas persyaratan-persyaratan atau rekomendasi pada komite pembiayaan, serta memproses dropping kredit, bank garansi, dan fasilitas-fasilitas lainnya.
- c. Secara aktif melakukan monitoring atas tanggal jatuh tempo angsuran dan akad
- d. Menyimpan dan menjaga formulir-formulir yang diperlukan dalam proses pembiayaan sebagaimana yang telah ditetapkan.
- e. Menyimpan file-file surat keluar untuk kepentingan dalam operasional penyimpanan.

#### **11. Bagian Keuangan dan Umum**

- a. Bertanggung jawab atas penyimpanan, penyusunan, keberadaan serta kerapian dokumen transaksi harian tersebut.
- b. Membuat dan melaporkan data-data karyawan sehubungan dengan data *pyroll* (bumt,hak cuti, lembur dan lain-lain), serta perubahan data karyawan, terutama yang berhubungan dengan personil file.
- c. Melayani kebutuhan karyawan dalam hal uang,kesehatan, makanan dan transport lembur.

- d. Membuat administrasi kebutuhan karyawan dalam hal mengambil cuti regular maupun tahunan dan mengatur jadwal cuti sehingga tidak mengganggu aktivitas kantor.
- e. Melayani perjalanan dinas karyawan dan hal-hal yang berhubungan dengan biaya perjalanan dinas karyawan.
- f. Membuat surat memo, dan mengirimkan untuk kepentingan cabang yang berhubungan langsung dengan pimpinan cabang dan manager operasional.
- g. Memfile surat, memo keluar dan masuk.
- h. Melaksanakan tugas rekrutmen apabila dibutuhkan penambahan karyawan.
- i. Mengurus pembayaran dan pelaporan PPH pasal 21 karyawan ke kantor pelayanan pajak.
- j. Memelihara dan menjaga kerahasiaan perusahaan dan karyawan.
- k. Melakukan *Cash Count* terhadap uang tunai yang berada di *teller* maupun di kasanah minimal sebulan sekali.
- l. Menjalankan intruksi lain dari atasan dengan baik.
- m. Melakukan *Cash Count Petty* dan pemeriksaan rutin materai tempel sebulan sekali.
- n. Bertanggung jawab atas percetakan cek dan bilyet giro yang diminta bagian CS.
- o. Membina suasana kerja yang harmonis dan kondusif yang mendukung pencapaian target Bank Riau Kepri. Cabang Syari'ah Pekanbaru
- p. Mengadministrasi *statemen* rekening giro nasabah dan memantau pengirimannya serta mereview dokumen-dokumen yang kembali ke bank.

### C. Aktivitas Usaha Bank Riau Kepri Syari'ah

Pada saat ini aktivitas yang sudah dijalankan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah adalah sebagai berikut :<sup>6</sup>

#### 1. Produk Pendanaan Syariah

##### a. Tabungan SINAR Mudharabah

Tabungan SINAR Mudharabah adalah tabungan berdasarkan prinsip Mudharabah *Mutlaqah*

##### b. Deposito Mudharabah

Deposito Mudharabah adalah simpanan dana berjangka dengan menggunakan akad mudharabah yang penarikannya hanya dapat dilakukan pada waktu tertentu berdasarkan perjanjian nasabah penyimpan dengan bank.

##### c. Tabungan Haji DHUHA

Tabungan haji dhuha adalah simpanan calon jamaah haji secara perorangan yang akan mendaftar sebagai calon haji melalui bank penerimaan setoran ibadah haji PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru yang terhubung langsung dengan SISKOHAT, yang penarikannya hanya dapat dilakukan menurut syarat-syarat tertentu.

##### d. Giro Syariah

Giro Syariah hadir dengan akad wadiah yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat dengan menggunakan Bilyet Giro, cek, sarana perintah bayar lainnya, atau dengan pemindah bukuan. Dengan giro

---

<sup>6</sup> Zammaibar Kahar, Pimpinan Cabang Utama PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru dalam catatannya yang berjudul "*Informasi Produk Bank Riau Syariah*". h.5

wadiah maka nasabah dapat melakukan penarikan, penyetoran, transfer dana dan pembayaran tunai sewaktu-waktu.

## **2. Produk Pembiayaan Syariah**

### **a. Pembiayaan modal kerja atas dasar kontrak**

Pembiayaan modal atas dasar kontrak adalah pembiayaan yang diberikan untuk membantu rekanan mendapatkan tambahan modal kerja dan instansi pemerintah atau instansi lainnya.

### **b. Pembiayaan Modal Kerja Umum**

Pembiayaan kerja umum adalah pembiayaan yang diberikan untuk memenuhi kebutuhannya terhadap aktiva tetap, aktiva lancar, dan barang bergerak.

### **c. Pembiayaan Aneka Guna Syari'ah**

Pembiayaan aneka guna syari'ah adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai dan pensiun yang berpenghasilan tetap, pekerja profesi, dan pengusaha dalam rangka pembiayaan tanah untuk perumahan, pembangunan/ rehabilitas/ renovasi rumah sendiri, pembelian prabot dan peraaan rumah tangga serta kebutuhan lainnya sesuai dengan prinsip syari'ah (murabahah dan ijaroh), pembiayaan aneka guna dapat juga diberikan untuk menunjang kegiatan usaha dalam rangka meningkatkan kesejahteraan yang dilakukan oleh nasabah yang tidak berkaitan langsung dengan tugas pokoknya.

d. Pembiayaan Pemilikan Kendaraan Bermotor

Pembiayaan pemilikan kendaraan bermotor *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai berpenghasilan tetap, pensiunan, pekerja propesi dan pengusaha dalam rangka kepemilikan kendaraan bermotor roda dua dan roda empat.

e. Pembiayaan Kepemilikan Rumah

Pembiayaan kepemilikan rumah *murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai berpenghasilan tetap, pensiunan, pekerja propesi dan pengusaha untuk memiliki tanah dan bangunan diatasnya termasuk rumah susun, ruko, kios, apartemen, kapling siap dibangun.

f. Pembiayaan Pengusaha Kecil

Pembiayaan Pengusaha Kecil *Murabahah* adalah pembiayaan yang diberikan kepada pegawai kecil baik perorangan maupun kelompok untuk pembiayaan modal kerja atau unvestasi dengan prinsip mudharabah. Usaha-usaha yang dibiayai adalah semua sector ekonomi yang produktif terkecuali sektor-sektor ekonomi yang dilarang berdasarkan ketentuan Bank Indonesia atau sektor-sektor ekonomi yang dianggap telah jenuh.

### 3. Aktivitas Jasa Bank

- a. Inkaso
- b. Kliring
- c. Kiriman Uang
- d. Bank Garansi
- e. Surat Dukungan Bank



#### 4. Produk Keunggulan lainnya

##### a. Gadai Emas Syariah (Rahn)

Rahn emas adalah fasilitas pinjaman yang diberikan PT. Bank Riau Syariah Cabang Kepri kepada nasabah dengan jaminan berupa emas perhiasan atau emas batangan dengan mengikuti prinsip gadai.

Selain melakukan kegiatan usaha-usaha tersebut di atas bank dapat pula :

1. Melakukan kegiatan dalam valuta asing berdasarkan prinsip sharf
2. Melakukan kegiatan penyertaan modal sementara berdasarkan prinsip musyarakah atau mudharabah pada bank atau perusahaan lain yang melakukan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syari'ah.
3. Bertindak sebagai pendiri dana pensiun dan pengurus dan pensiun berdasarkan prinsip syari'ah sesuai dengan peraturan dan perundang-undangan dana pensiun yang berlaku.
4. Bank dapat bertindak sebagai lembaga *Baitul Mall* yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infaq, shadaqah, wakap, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkannya kepada yang berhak dalam santunan atau pinjaman kebajikan (Qardul hasan ).

Sebagai alat kelengkapan otonomi daerah, bank mempunyai tugas lain :

1. Sebagai penggerak dan pendorong laju pertumbuhan ekonomi daerah.
2. Sebagai pemegang kas daerah yang berdasarkan prinsip bagi hasil dan melaksanakan penyimpanan uang daerah.
3. Sebagai salah satu sumber pendapatan daerah.

Pada tanggal 17 Februari 2007 di *Fislamic Finance Summit* yang ditaja oleh *Karim Bussiness Consulting*, PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah Pekanbaru meraih dua penghargaan *Islamic Finance Quality Award* dan *Islamic Finance Award 2006*. PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru meraih dua penghargaan untuk katagori *Top New Third Party Fund Market Gainer* unit usaha syariah kelompok asset bank sampai dengan 100 Milyar.<sup>7</sup> Pemberian penghargaan award kepada PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru tersebut karena berbagai prestasi yang dicapai oleh PT. Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru seperti keberhasilan dalam pertumbuhan Dana Pihak Ketiga (DPK) sebesar 440 % selama tiga tahun terakhir. Selain dari itu keberhasilannya juga dilihat dari segi bagi hasil untuk tabungan sepanjang tahun 2006 rata-rata dengan *equivmen rate* (setara dengan bunga) 7,5% per anum (setahun). Sedangkan untuk bagi hasil deposito 1 bulan setara dengan 8,10%, dan deposito 6 bulan 8,55 %, serta untuk deposito selama 12 bulan setar 8,86 %.

#### **D. Visi dan Misi**

Visi : Menjadi mitra syariah jasa layanan perbankan yang terkemuka di daerah, sehat dan kompetitif sesuai dengan ketentuan syari'ah.

Misi : Secara teguh memenuhi prinsip kehati-hatian, mampu mendukung sektor riil dan konsisten menjalankan prinsip syariah secara optimal

---

<sup>7</sup>. *Company profit PT. Bank Riau Syariah Cabang Pekanbaru*, op.cit.,h. 32.

### BAB III

#### TINJAUAN UMUM TENTANG AKUNTANSI SYARI'AH

##### A. Pengertian Akuntansi Syari'ah

Secara *Etimologi*, Kata akuntansi berasal dari bahasa inggris, *accounting*, dalam bahasa arabnya disebut “*muhasabah*” yang berasal dari kata *hasaba*, *hasibah*, *muhasabah*, artinya menimbang, memperhitungkan, mengkalkulasi, mendata, atau menghisab, yakni menghitung dengan seksama atau teliti yang harus dicatat dalam pembukuan tertentu.<sup>1</sup> Sedangkan secara terminologi akuntansi adalah proses mengidentifikasi, mengukur, dan menyampaikan informasi ekonomi sebagai bahan informasi dalam hal pertimbangan dalam mengambil kesimpulan oleh para pemakainya.

Akuntansi syari'ah menurut Iwan Triyuwono merupakan salah satu upaya mendekonstruksi akuntansi modern kedalam bentuk yang humanis dan syarat nilai.<sup>2</sup> Akuntansi Syari'ah adalah suatu kegiatan identifikasi, klarifikasi, pendataan, dan pelaporan melalui proses perhitungna yang terkait dengan transaksi keuangan sebagai bahan informasi dalam mengambil keputusan ekonomi berdasarkan prinsip akad-akad syari'ah, yaitu tidak mengandung *zhulum* (kezaliman), *riba*, *maysir* (judi), *gharar* (*penipuan*), barang yang diharamkan, dan membahayakan.<sup>3</sup> Akuntansi syar'iah juga dapat diartikan sebagai proses akuntansi

---

<sup>1</sup> Hasbi Ramli, *Teori Dasar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta : Renaisan, 2005) h.12.

<sup>2</sup> Iwan Triwuyono, *Perspektif Metodologi Teori Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006 ) h.196.

<sup>3</sup> Hasbi Ramli, *loc.cit.*

atas transaksi-transaksi yang sesuai dengan aturan yang telah ditetapkan Allah SWT<sup>4</sup>.

Akuntansi Syari'ah memiliki beberapa prinsip umum yang perlu dipegang teguh dalam pelaksanaannya sehari-hari :<sup>5</sup>

a. Prinsip Pertanggung jawaban

Pertanggung jawaban (*Accountability*) yaitu merupakan konsep yang tidak asing lagi dikalangan muslim. Pertanggung jawaban selalu berkaitan dengan konsep amanah. Implikasi dalam bisnis dan akuntansi adalah bahwa individu yang terlibat dalam praktik bisnis harus selalu melakukan pertanggung jawaban apa yang telah diamanatkan, wujud pertanggung jawabannya biasanya dalam bentuk laporan akuntansi.

b. Prinsip Keadilan

Dalam konteks akuntansi, bahwa setiap transaksi yang dilakukan oleh perusahaan dicatat dengan benar. Misalnya Bila nilai transaksi adalah sebesar Rp100 Juta, maka akuntansi perusahaan akan mencatatnya dengan jumlah yang sama.

c. Prinsip Kebenaran

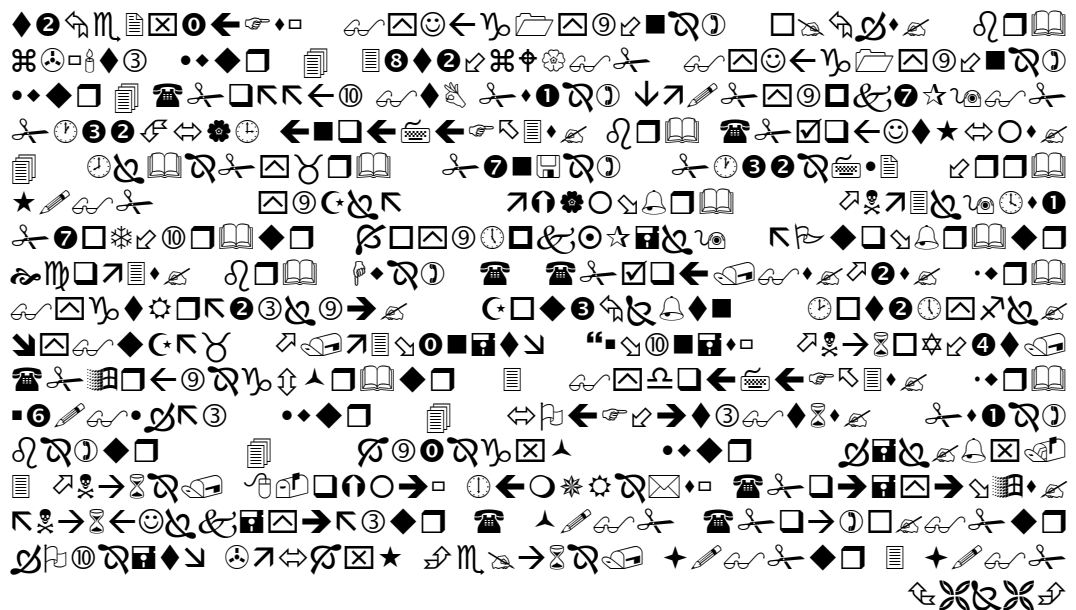
Prinsip kebenaran tidak dapat lepas dari prinsip keadilan. Akuntansi akan selalu dihadapkan pada masalah pengakuan, pelaporan. Aktivitas ini akan dapat dilakukan dengan baik apabila dilandasi dengan nilai kebenaran. Kebenaran di dalam Al-Qur'an tidak diperbolehkan untuk di campur adukkan dengan kebathilan

---

<sup>4</sup> Sri Nurhayati dk, *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta: salemba Empat, 2009) h.2.

<sup>5</sup> Muhammad, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta : PT. Salemba Empat Patria, 2002)





“Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu bermu'amalah tidak secara tunai untuk waktu yang ditentukan, hendaklah kamu menuliskannya. dan hendaklah seorang penulis di antara kamu menuliskannya dengan benar. dan janganlah penulis enggan menuliskannya sebagaimana Allah mengajarkannya, meka hendaklah ia menulis, dan hendaklah orang yang berhutang itu mengimlakkan (apa yang akan ditulis itu), dan hendaklah ia bertakwa kepada Allah Tuhannya, dan janganlah ia mengurangi sedikitpun daripada hutangnya. jika yang berhutang itu orang yang lemah akalnya atau lemah (keadaannya) atau Dia sendiri tidak mampu mengimlakkan, Maka hendaklah walinya mengimlakkan dengan jujur. dan persaksikanlah dengan dua orang saksi dari orang-orang lelaki (di antaramu). jika tak ada dua oang lelaki, Maka (boleh) seorang lelaki dan dua orang perempuan dari saksi-saksi yang kamu ridhai, supaya jika seorang lupa Maka yang seorang mengingatkannya. janganlah saksi-saksi itu enggan (memberi keterangan) apabila mereka dipanggil; dan janganlah kamu jemu menulis hutang itu, baik kecil maupun besar sampai batas waktu membayarnya. yang demikian itu, lebih adil di sisi Allah dan lebih menguatkan persaksian dan lebih dekat kepada tidak (menimbulkan) keraguanmu. (Tulislah mu'amalahmu itu), kecuali jika mu'amalah itu perdagangan tunai yang kamu jalankan di antara kamu, Maka tidak ada dosa bagi kamu, (jika) kamu tidak menulisnya. dan persaksikanlah apabila kamu berjual beli; dan janganlah penulis dan saksi saling sulit

menyulitkan. jika kamu lakukan (yang demikian), Maka Sesungguhnya hal itu adalah suatu kefasikan pada dirimu. dan bertakwalah kepada Allah; Allah mengajarmu; dan Allah Maha mengetahui segala sesuatu. <sup>7</sup> (Qs.Al-Bagarah: 282)

Ayat diatas menunjukkan kewajiban bagi orang beriman untuk mencatat setiap transaksi yang dilakukan dan belum tuntas. Perintah dalam ayat ini adalah untuk menjaga kebenaran dan keadilan, maksudnya perintah ini ditekankan pada kepentingan pertanggung jawaban agar pihak-pihak yang terlibat dalam transaksi itu tidak dirugikan, sehingga tidak menimbulkan konflik. Ayat ini juga menggambarkan angka keseimbangan atau neraca.<sup>8</sup>

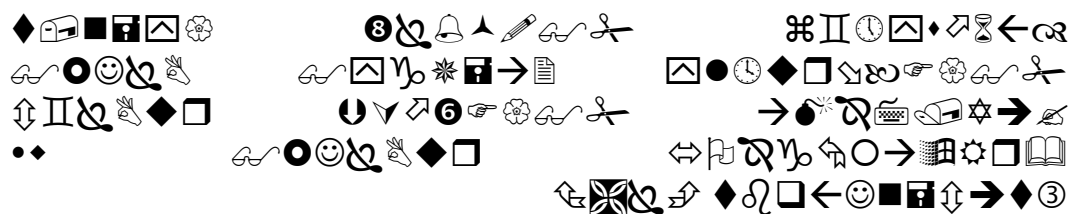
Dalam akuntansi yang menggunakan konsep *Double Entry*, didalam Islam sendiri sudah terdapat ayat yang menunjukkan hal tersebut, Firman Allah SWT dalam Al-Qur'an yaitu:

a. Adz- Dzariyat : 49 yang artinya :



“Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah).” <sup>9</sup> (Adz-Dzariyat : 49)

c. Qs. Yassin : 36



<sup>7</sup> Ibid, h.48.

<sup>8</sup> Sopyan Syafri Harahap, *op.,cit.* 141.

<sup>9</sup> Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan terjemahan, op.,cit.*h. 522.

“Maha suci Tuhan (Allah) yang telah menciptakan pasangan-pasangan semuanya, baik dari apa yang ditumbuhkan oleh bumi dan dari diri mereka maupun dari apa yang tidak mereka ketahui.”<sup>10</sup> (Qs. Yassin : 36)

#### d. Pendapat Ulama

Ibnu Abidin berkata : Catatan atau pembukuan seorang agen dan kasir bisa menjadi bukti berdasarkan kebiasaan yang berlaku. Kalau si pembeli atau kasir maupun agen itu tidak menggunakan catatan khusus, itu bisa merugikan orang lain, karena biasanya barang dagangan itu tidak dilihat, seperti halnya barang-barang yang dikirim ke koneksinya didaerah jauh. Jadi, dalam keadaan seperti itu, mereka biasanya berpegang pada ketentuan-ketentuan yang tertulis dalam daftar-daftar yang dijadikan pegangan ketika timbul resiko atau kerugian.”

Imam Syafi'i berkata ; “ Siapa yang mempelajari hisab atau perhitungan, luaslah pikirannya.”

#### e. Kaidah Fiqih :

Pada dasarnya segala bentuk muamalah boleh dilakukan sepanjang tidak ada dalil yang mengharamkan.

### C. Pembiayaan *Mudharabah*

#### 1. Pengertian Pembiayaan *Mudharabah*

*Mudharabah* berasal dari kata *dharb*, yang artinya memukul atau berjalan. Pengetian memukul atau berjalan ini lebih tepatnya adalah proses seseorang memukulkan kakinya dalam menjalankan usaha.

---

31 *Ibid*, h.442

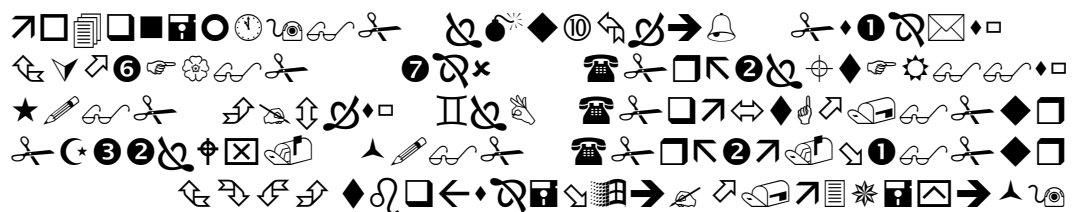


*Mudharabah* adalah kerja sama usaha antara dua pihak dimana pihak pertama (*Shahibul maal*) menyediakan seluruh (100%) modal, sedangkan pihak lain menjadi pengelola.<sup>11</sup> *Mudharabah* adalah Persetujuan kongsi antar harta dari salah satu pihak dengan kerja dari pihak lain, dengan tujuan untuk mendapatkan untung.<sup>12</sup>

## 2. Landasan Syari'ah

### a. Al-Qur'an

Firman Allah QS. Al- Jumu'ah:10



“Apabila telah ditunaikan shalat, Maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung”<sup>13</sup> (QS. Al- Jumu'ah:10)

### b. Hadist

Hadist Nabi riwayat Thabrani :

رؤى ابن عباس رضى الله عنهما انه قال :كان سيدنا العباس بن عبد المطلب اذا دفع المال مضاربه اشترط على صاحبه ان لا يسلك به بحر ولا ينزل به ولا يشتري به دابة دات كبد رطبة فعل ذلك ضمن فبلغ شرطه رسول الله صلى الله عليه وسلم فاجازه (

“Abbas bin Abdul Muthalib jika menyerahkan harta sebagai mudharabah, ia mensyaratkan kepada mudharibnya agar tidak mengarungi lautan dan tidak menuruni lembah, serta tidak membeli hean ternak. Jika persyaratan ini dilanggar,

<sup>11</sup> Muhammad , Syafi'i Antonio, *op.,cit.* h. 90

<sup>12</sup> Adiwarman, A. Karim, *op.,cit.* h. 205

<sup>13</sup> Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan terjemahan*, ( Jakarta : Syaamil Qur'an, 2009) QS. Al- Jumu'ah : 10. h 554.

ia (*mudharib*) harus menanggung resikonya. Ketika persyaratan yang ditetapkan *Abba* situ didengar Rasulullah, beliau membenarkannya “ (HR.Thabrani dari Ibnu Abbas)”.( *majama’assawaid* 4/161).

### 3. Manfaat dan Resiko *Mudharabah*

#### 3.1. Manfaat *Mudharabah*

1. Bank akan menikmati peningkatan bagi hasil pada saat keuntungan usaha nasabah meningkat.
2. Bank tidak berkewajiban membayar bagi hasil kepada nasabah pendanaan secara tetap disesuaikan dengan pendapatan/ hasil usaha bank sehingga tidak pernah mengalami *negative spread*.
3. Pengembalian pokok pembiayaan disesuaikan dengan cash flow/ arus kas usaha nasabah sehingga tidak memberatkan nasabah.
4. Bank akan lebih selektif dan hati-hati (*prudent*) mencari usaha yang benar-benar halal, aman dan menguntungkan karena keuntungan yang kongkrit dan benar-benar terjadi itulah yang akan dibagikan.
5. Prinsip bagi hasil *mudharabah* ini berbeda dengan bunga tetap dimana bank akan menagih penerimaan pembiayaan satu jumlah bunga tetap berapa pun keuntungan yang dihasilkan nasabah, sekalipun merugikan dan terjadi krisis ekonomi.

#### 3.2. Resiko *Mudharabah*

Resiko yang terdapat dalam *mudharabah* terutama pada penerapannya dalam pembiayaan relative tinggi, diantaranya :

1. *Slide Streaming*, nasabah menggunakan dana itu bukan yang disebutkan dalam kontrak

2. Lalai dan kesalahan yang disengaja
3. Menyembunyikan keuntungan oleh nasabah bila nasabahnya tidak jujur
4. Metode Bagi Hasil *Mudharabah*

Metode bagi hasil *mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode yaitu :<sup>14</sup>

#### 4.1. Bagi Laba ( *Profit Sharing* )

Bagi laba dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengolahan dana *mudharabah*.

#### 4.2. Bagi Pendapatan ( *Revenue Sharing* )

Bagi pendapatan dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

### **D. Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah***

Bank-bank Islam menggunakan prinsip *mudharabah* dengan para pemegang rekening investasi (deposan/Penabung) dalam menghimpun dana, dan bisa juga melaksanakan pemberian pembiayaan *mudharabah*, dimana dalam perlakuan akuntansinya sangat berbeda. Perlakuan Akuntansi yang berkaitan dengan transaksi pembiayaan *mudharabah* telah diatur di dalam PSAK no 105 tentang Akuntansi Perbankan Syariah dapat dijelaskan dalam kelompok-kelompok permasalahan sebagai berikut :

#### **1. Pengakuan dan pengukuran pembiayaan *mudharabah***

Dalam PSAK 101 tentang Akuntansi Perbankan Syariah, pengakuan dan pengukurannya antara lain :<sup>15</sup>

- a. Pengakuan pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :

---

<sup>14</sup> Slamet Wiyono. *Op.cit*, h 57.

<sup>15</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat 2009).h 2.

1. Pembiayaan *mudharabah* diakui pada saat pembayaran kas atau penyerahan aktiva non kas kepada pengelola dana (*mudharib*) ; dan
  2. Pembiayaan *mudharabah* yang diberikan secara bertahap diakui pada setiap tahap pembayaran atau penyerahan.
- b. Pengukuran pembiayaan *mudharabah* adalah sebagai berikut :<sup>16</sup>
1. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk kas diukur sejumlah uang yang diberikan bank pada saat pembayaran.
  2. Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non kas :
    - i. Diukur sebesar nilai wajar aktiva non kas pada saat penyerahan :
    - ii. Selisih antara nilai wajar buku aktiva non kas diakui sebagai keuntungan atau kerugian bank ; dan
  3. Beban yang terjadi sehubungan dengan *mudharabah* tidak dapat diakui sebagai bagian pembiayaan *mudharabah* kecuali telah disepakati bersama.
- c. Setiap pembayaran kembali atas pembiayaan *mudharabah* oleh pengelola dana (*mudharib*) mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah*.
- d. Apabila sebagian pembiayaan *mudharabah* hilang sebelum dimulainya usaha karena adanya kerusakan atau sebab lainnya tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pihak *mudharib*, maka rugi tersebut mengurangi saldo pembiayaan *mudharabah* dan diakui sebagai kerugian bank.
- e. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non kas maka kegiatan usaha *mudharabah* dianggap mulai berjalan sejak barang tersebut diterima oleh *mudharib* dalam kondisi siap dipergunakan.

---

<sup>16</sup> *Ibid*, h.3

- f. Apabila sebagian pembiayaan hilang setelah dimulainya usaha tanpa adanya kelalaian atau kesalahan pengelola dana (*mudharib*) maka rugi tersebut diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- g. Apabila pembiayaan diberikan dalam bentuk non-kas dan barang tersebut mengalami penurunan nilai pasar pada saat atau setelah barang digunakan secara efektif dalam kegiatan usaha maka rugi tersebut tidak langsung mengurangi jumlah pembiayaan namun diperhitungkan pada saat bagi hasil.
- h. Kelalaian atau kesalahan pengelola dana (*mudharib*), antara lain ditunjukkan oleh :<sup>17</sup>
  1. Tidak dipenuhinya persyaratan yang ditemukan dalam akad ;
  2. Tidak terdapat kondisi diluar kemampuan (*force majeure*) yang lazim atau yang telah ditentukan di dalam akad; atau
  3. Hasil putusan dari badan arbitrase atau pengadilan
- i. Apabila *mudharabah* berakhir sebelum jatuh tempo dan pembiayaan *mudharabah* belum dibayar oleh pengelola dana, maka pembiayaan *mudharabah* diakui sebagai piutang jatuh tempo.

Adapun bentuk Jurnal-jurnal *mudharabah* menurut PSAK 105 tersebut antara lain :

1. Pembiayaan *mudharabah* dengan 100% kas

- a. Saat pembiayaan *mudharabah* disetujui

	Debet	Kredit
Kontrak Komitmen pembiayaan <i>mudharabah</i>	xxxx	
Kewajiban komitmen pembiayaan <i>mudharabah</i>		xxxx

---

<sup>17</sup> Slamet Wiyono. *op, cit.* h 123.

## b. Saat dilakukan penyerahan modal kepada mudharib

	Debet	Kredit
Pembiayaan Mudharabah	xxxx	
Rekening Mudharabah		xxxx

## c. Saat penyelesaian pembiayaan mudharabah

	Debet	Kredit
Kewajiban komitmen pembiayaan mudharabah		xxxx
Kontrak pembiayaan mudharabah		xxxx

2. Pembiayaan *mudharabah* dengan sebagian kas dan aktiva non-kas

## a. Saat bank melakukan pembelian aktiva non-kas

	Debet	Kredit
Persediaan Aktiva	xxxx	
Rekening suplier		xxxx

## b. Saat pembiayaan mudharabah disetujui

	Debet	Kredit
Kontrak komitmen pembiayaan mudharabah	xxxx	
Kewajiban pembiayaan mudharabah		xxxx

## c. Saat dilakukan penyerahan modal kas kepada mudharib

	Debet	Kredit
Pembiayaan Mudharabah	xxxx	
Rekening Mudharib		xxxx

## d. Saat dilakukan penyerahan modal aktiva non - kas kepada mudharib

	Debet	Kredit
Pembiayaan Mudharabah	xxxx	
Kerugian (keuntungan ) Penyerahan aktiva	xxxx	
Persediaan aktiva		xxxx

\* *Jika ada keuntungan maka menambah pembiayaan mudharabah*

### 3. Pengurangan nilai aktiva non-kas sebelum diserahkan pada *mudharib*

#### a. Saat bank membentuk cadangan kerugian

	Debet	Kredit
Beban penyisihan kerugian mudharabah	xxxx	
Cadangan penyisihan kerugian Mudharabah		xxxx

#### b. Saat penghapusbukuan

	Debet	Kredit
Cadangan Penyisihan kerugian mudharabah	xxxx	
Pembiayaan mudharabah		xxxx

### 4. Pengurangan nilai aktiva non-kas setelah diserahkan pada *mudharib* dan terbukti akibat dari kelalaian.

#### Saat pembayaran

	Debet	Kredit
Rekening Mudharib	xxxx	
Pembiayaan Mudharabah		xxxx

## 2. Pengakuan Laba dan Rugi *Mudharabah*

Jika pembiayaan *mudharabah* terus berlanjut, lebih dari pada jangka waktu yang ditetapkan (Melebihi satu periode tahun buku), maka pembagian keuntungan diakui pada masing-masing jangka waktu yang telah ditetapkan, namun kerugian yang akan diakui setelah lewat dari jangka waktu/tahun buku yang telah ditetapkan dan setelah dikurangi modal.

Fatwa Dewan Syari'ah Nasional nomor 15/DSN-MUI/IX/2000 tertanggal 16 September 2000 perihal prinsip distribusi hasil usaha, pada dasarnya lembaga keuangan syari'ah boleh menggunakan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*)

maupun bagi untung (*Profit Sahring* ) dalam pembagian hasil usaha dengan mitra (nasabah)-Nya, tetapi dilihat dari segi kemasalahatannya (*al-ashlah*), pembagian hasil usaha sebaiknya digunakan prinsip bagi hasil (*Revenue Sharing*) dan dalam menentukan prinsip ini harus disepakati dari awal.

Dalam PSAK 105 tentang Akuntansi pembiayaan *mudharabah*, sebagai berikut :<sup>18</sup>

1. Apabila pembiayaan *mudharabah* melewati satu priode pelaporan :
  - a. Laba pembiayaan *mudharabah* diakui dalam priode terjadinya hak bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati : dan
  - b. Rugi yang terjadi diakui dalam priode terjadinya rugi tersebut dan mengurangi saldo pembiayaan *Mudharabah*.
2. Pengakuan Laba dan Rugi *Mudharabah* dalam praktek dapat diketahui berdasarkan laporan bagi hasil dari pengelola dana yang diterima oleh bank.
3. Bagi Hasil *Mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba ( *profit sharing* ) atau bagi pendapatan ( *Revenue Sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengna pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan *mudharabah*.

Tabel III.1

Perhitungan Bagi Hasil Pembiayaan *Mudharabah*

Uraian	Jumlah	Metode Bagi Hasil
Penjualan	100	<i>Revenue Sharing</i>
Harga Pokok Penjualan	65	

<sup>18</sup> Ikatan Akuntansi Indonesia, *Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan*,( Jakarta : Salemba Empat, 2007),h.3.



Laba Kotor	35	
Beban	25	
Laba Rugi Bersih	10	<i>Profit Sharing</i>

Sumber Data : Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan tahun 2009.

4. Rugi Pembiayaan *Mudharabah* yang diakibatkan penghentian *mudharabah* sebelum masa akad berakhir diakui sebagai pengurangan pembiayaan *mudharabah*.
5. Rugi Pengelolaan yang timbul akibat kelalaian atau kesalahan *mudharib* dibebankan pada pengelola dana (*mudharib*).
6. Bagian laba bank yang tidak dibayarkan oleh pengelola dana (*mudharib*) pada saat *mudharabah* selesai atau dihentikan sebelum masanya berakhir diakui sebagai piutang jatuh tempo kepada pengelola dana (*Mudharib*).

### 3. Pengungkapan

Pemilik dana mengungkapkan hal-hal yang terkait dengan transaksi *mudharabah*, tetapi tidak terbatas pada :

- a. Isi kesepakatan utama *mudharabah* seperti porsi dana, pembagian hasil usaha, aktivitas usaha *mudharabah*, dan lain- lain ;
- b. Rician jumlah investasi *mudharabah* berdasarkan jenisnya;
- c. Penyisihan kerugian investasi *mudharabah* selama periode berjalan;
- d. Pengungkapan yang diperlukan sesuai PSAK No. 101 tentang penyajian laporan keuangan syariah;<sup>19</sup>

Adapun bentuk jurnal-jurnal *Mudharabah* apabila terjadi Laba atau Rugi *Mudharabah* antara lain :

---

<sup>19</sup> Sri Nurhayati. *op.cit*.h.122.

## 1. Keuntungan sehubungan bagi hasil usaha

	Debet	Kredit
--	-------	--------

Rekening nasabah	xxxx	
------------------	------	--

Pendapatan bagi hasil Mudharabah		xxxx
----------------------------------	--	------

## 2. Terjadi kerugian usaha bukan akibat kelalaian mudharib

## a. Saat bank membentuk cadangan kerugian

	Debet	Kredit
--	-------	--------

Beban penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah	xxxx	
---	------	--

Cadangan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah		xxxx
--	--	------

## b. Saat penghapusbukuan

	Debet	Kredit
--	-------	--------

Cadangan penyisihan kerugian pembiayaan mudharabah Rekening nasabah	xxxx	
---	------	--

Pembiayaan Mudharabah		xxxx
-----------------------	--	------

## 3. Keterlambatan pembayaran bagi hasil oleh mudharib

## a. Saat pengakuan pendapatan

	Debet	Kredit
--	-------	--------

Piutang kepada mudharib	xxxx	
-------------------------	------	--

Pendapatan bagi hasil Mudharabah		xxxx
----------------------------------	--	------

## b. Saat dilakukan pembayaran oleh mudharib

	Debet	Kredit
--	-------	--------

Rekening nasabah	xxxx	
------------------	------	--

Piutang kepada mudharib		xxxx
-------------------------	--	------

Debet dan Kredit xxxx bermakna seseorang nasabah melakukan pembiayaan mudharabah dengan PT. Bank Riau Kepri Cabang Syariah pekanbaru. Setiap transaksi akuntansi berbentuk nilai pada priode dilakukannya transaksi.

## **5. Pengaturan Pengakhiran *Mudharib***

- a. *Mudharib* harus mengembalikan modal kepada pemilik dana, dan apabila ia tidak melaksanakan demikian, ia akan dianggap sebagai pelanggar, dan dana tersebut akan menjadi suatu agunan, dan jumlah yang akan diubah dari *mudharabah* menjadi hutang jatuh tempo kepada *mudharib*.
- b. Dalam hal *mudharabah* ini berakhir, dan bagian atau semua dari dana merupakan barang-barang yang belum dijual, dan apabila mereka sepakat mengenai penjualannya atau untuk membaginya di antara mereka, atau salah satu dari mereka mengambilnya untuk dirinya sendiri dan memberikan kepada yang lainnya pembayaran tunai yang jatuh tempo. Maka, hal diatas akan dapat diperbolehkan.
- c. Sirkulasi dari dana *Mudharabah*, apabila salah satu dari kedua belah pihak meminta untuk berhenti dari *mudharabah*, maka akan dilanjutkan oleh lainnya apabila terdapat jumlah beberapa orang. Hal ini akan memungkinkan dan pihak yang meninggalkan dapat menjual bagiannya dalam *mudharabah* tersebut kepada pihak lainnya, asalkan bagiannya tersebut dalam modal dinilai. Apabila ia merupakan pemilik dari dana, maka hal ini harus dinilai dengan harga penjualan saat ini, dan *mudharib* harus memperoleh bagian dari keuntungan yang diestimasikan tersebut jika ada.

## **BAB IV**

### **Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru**

#### **A. Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* pada PT. Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru**

Beberapa hal yang ditemukan pada PT. Bank Riau Kepri Syari'ah yang berhubungan dengan Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* dalam praktiknya pada Bank Riau Syariah mekanisme perhitungan bagi hasil yang sering di pakai *Revenue Sharing*, alasannya jika memakai *Profit Sharing* resikonya tinggi, dan adanya pembukuan ganda dari pihak penerima dana. Akibatnya pihak yang selalu diuntungkan adalah *Rabb al-mall*.

#### **Implementasi pembiayaan *Mudharabah* pada Bank Riau Kepri Syariah**

##### **1. Aspek Teknis**

###### **1.1. Penggunaan**

Pembiayaan *mudharabah* pada Bank Riau Syari'ah diterapkan untuk pembiayaan produktif. Dalam pelaksanaanya, bank Riau Syariah melakukan pembiayaan *mudharabah* mutlaq yaitu *mudharabah* yang sifatnya *mutlaqah* dimana *shahib al-mal* tidak menetapkan restriksi atau syarat-syarat tertentu kepada si *mudharib*.

###### **1.2. Jenis usaha yang boleh dilakukan**

- a. Retail
- c. Manufaktur
- d. Koperasi

### 1.3. Bank

- a. Bank yang menentukan nominal pembiayaan *mudharabah* yang dilakukan setelah mempertimbangkan proposal pembiayaan dari nasabah
- b. Bank melakukan pengawasan terhadap nasabah yang melakukan pembiayaan *mudharabah* untuk memastikan usaha yang dijalankan oleh *mudharib* tidak melanggar ketentuan yang berlaku dan mengurangi resiko.

### 1.4. Nasabah

- a. Hak nasabah mendapat bagi hasil atas pembiayaan yang diberikan oleh bank atas usaha yang ia lakukan.
- b. Nasabah memiliki kemauan dan kemampuan untuk membayar, yaitu bagi hasil serta kewajiban yang sudah disebutkan saat akad ataupun secara lisan
- c. Nasabah tidak cacat hukum

### 1.5. Jaminan

1. Jaminan untuk pembiayaan *mudharabah* di Bank Riau Syari'ah adalah wajib, karena itu merupakan aturan dari bank sentral dalam hal ini adalah BI.
2. Bentuk jaminan bisa berupa benda fisik maupun non kebendaan seperti *personal warranty* (jaminan orang yang berbentuk nama baik atau lainnya).
3. Nilai benda yang dijamin harus lebih besar dari jumlah nominal pembiayaan yang dilakukan untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan.

### 1.6. Jangka waktu

1. Jangka waktu untuk pembiayaan *mudharabah* itu ditentukan oleh pihak bank dengan memperhatikan kemampuan nasabah.
2. Nasabah bisa melakukan penawaran untuk menentukan jangka waktu pembiayaan *mudharabah*.
3. Jangka waktu pembiayaan *mudharabah* adalah antara 1 bulan sampai dengan 10 tahun atau sesuai kebijakan manajemen bank.

### 1.7. Saksi

Saksi adalah notaris dan yang hadir saat pelaksanaan akad

### 1.8. Asuransi

Premi asuransi dibayarkan nasabah kepada bank sebagai jaminan dari objek usah yang dilakukan yang dibayarkan langsung ke bank Riau Syari'ah ataupun melalui rekanan Bank Riau Syari'ah yang ditunjuk leh Bank Riau Syari'ah.

### 1.8. Lain- lain

1. Pengenaan biaya administrasi/denda akibat kesalahan nasabah ditentukan kemudian
2. Bila nasabah tidak mampu memenuhi kewajiban maka penyelesaiannya diputuskan oleh komite yang dibentuk oleh manajemen bank.

## 2. Aspek Keuangan

### 2.1. Pembayaran

- a. Penyerahan modal pembiayaan kepada nasabah dilakukan dalam bentuk uang tunai maupun non tunai ( barang modal ).

- b. Jumlah yang dibayarkan adalah sebesar yang telah disepakati kedua belah pihak saat akad.

## 2.2. Biaya- biaya

- a. Biaya administratif
- b. Biaya upah langsung
- c. Biaya notaris
- d. Biaya materai dan lain-lain yang dipersaratkan.

## 3. Bagi Hasil Nasabah

- a. Keuntungan akan dibagi untuk kedua belah pihak dengan persentase yang telah disepakati dalam akad.
- b. Dalam perhitungan bagi hasil, metode yang digunakan adalah *revenue sharing*.
- c. Persentase perhitungan bagi hasil untuk nasabah adalah dari pembagian antar target *return on investment* Bank Riau Syari'ah dengan total pendapatan nasabah.

Praktek perbankan *mudharabah* di Bank Riau Syari'ah meliputi keuangan, bagi hasil telah sesuai dengan teori yang ada dan hal tersebut tidak bertentangan dengan peraturan yang berlaku yaitu Fatwa Dewan Syari'ah Nasional. Hal-hal tersebut diperlukan untuk meyakinkan nasabah dalam melakukan akad *mudharabah*. Dalam akad *mudharabah* jaminan dijadikan syarat untuk menjaga agar nasabah tidak main-main dengan kerja sama pembiayaan yang dilakukan dan jaminan ini merupakan syarat yang diatur oleh BI dalam hal pembiayaan baik itu konvensional maupun syari'ah. Serta jaminan ini diperlukan oleh bank untuk

menghindari resiko yang merugikan bank dan juga untuk melihat kemampuan nasabah dalam menanggung kewajiban.

Dari segi pembayaran Bank Riau Syari'ah juga menetapkan kewajiban nasabah yang harus membayar kewajiban dan bagi hasil yang dilakukan dengan mendeбет rekening di Bank Riau Syari'ah<sup>1</sup>. Penerapan pengembalian modal usaha akte bank, Bank Riau Syari'ah memberikan opsi kepada nasabahnya untuk bisa memilih sistem pengembalian modal usahanya, yaitu bisa dengan angsuran setiap bulannya ataupun dikembalikan langsung sejumlah modal yang diberikan beserta bagi hasilnya pada akhir priode.

Dalam Praktek perbankan Bank Riau Syari'ah sangat selektif dalam hal pemilihan nasabah yang ingin melakukan kerjasama pembiayaan *mudharabah*. Dimana Bank Riau Syari'ah tidak pernah memberikan modal usaha untuk usaha yang baru mulai, sehingga ini sedikit meyulitkan bagi pelaku usaha yang membutuhkan modal usaha untuk menilai usahanya.

Berdasarkan Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No.105 Tahun 2009 Tentang Akuntansi Pembiayaan Mudharabah dinyatakan bahwa Bagi Hasil *Mudharabah* dapat dilakukan dengan menggunakan dua metode, yaitu bagi laba (*profit sharing*) atau bagi pendapatan (*Revenue Sharing*). Bagi laba, dihitung dari pendapatan setelah dikurangi beban yang berkaitan dengan pengelolaan dana *mudharabah*. Sedangkan bagi pendapatan, dihitung dari total pendapatan pengelolaan dana *mudharabah*. Dari hasil penelitian Pada PT. Bank Riau Syari'ah dalam praktiknya mekanisme perhitungan bagi hasil yang sering dipakai *Revenue*

---

<sup>1</sup> Anthon, Pegawai, (Wawancara, taggal 13 Januari 2011).



*Sharing Methode*.<sup>2</sup> Alasannya jika memakai *Profit Sharing* resikonya tinggi, dan adanya pembukuan ganda dari pihak penerima dana. Akibatnya dengan metode *revenue Sharing* pihak yang selalu diuntungkan adalah *Rabb al-maall* atau pemilik dana dalam hal ini PT. Bank Riau Cabang Syari'ah.

Permasalahan pilihan *profit sharing* atau *Revenue Sharing* sebenarnya merupakan permasalahan yang khas pada produk dengan akad *mudharabah*. Masalah ini timbul ketika bank syariah sebagai *shahibul maal* harus menghadapi resiko yang cukup tinggi, penyaluran dananya kepada masyarakat secara hukumnya tidak diperkenankan turut campur dalam kegiatan sehari-hari usaha pengelola dana atau *mudharib*. Apabila *Revenue Sharing* yang dipilih maka jumlah yang harus dibagi hasilnya lebih banyak, tetapi bagi *mudharib* menjadi berkurang karena semua ongkos yang telah dipergunakan menjadi tanggungannya. Dengan demikian yang diuntungkan adalah *Shahibul maal*. Sedangkan *Profit Sharing* dapat menguntungkan *mudharib* atau merugikan *shahibul maal* apabila biaya-biaya usaha tidak dikendalikan.

Besar kecilnya pendapatan *mudharabah* pada perusahaan dipengaruhi oleh metode bagi hasil *mudharabah* itu sendiri. Dan ini merupakan kebijakan perusahaan dengan mempertimbangkan kepentingan perusahaan dan nasabah. Bank Riau Cabang Syariah selalu memfokuskan seluruh aktifitasnya mengamankan pendapatan tersebut, baik dari kesalahan pencatatan transaksi dan dari transaksi yang dapat mengurangi nilai pendapatan itu sendiri. Untuk mengamankannya Bank Riau Syari'ah memerlukan suatu perlakuan akuntansi

---

<sup>2</sup> Adi Rahmat, (Pegawai pada PT, Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru), Wawancara, Pekanbaru, 20 Februari 2011.

yang benar dan tepat terhadap pendapatan sehingga laporan keuangan terutama laporan laba rugi yang diterbitkan oleh perusahaan dapat menggambarkan posisi keuangan dan Wajar.

Pencatatan pembiayaan *mudharabah* yang diterapkan oleh PT. Bank Riau Cabang Syari'ah Pekanbaru dalam bentuk kas adalah sebagai berikut :<sup>3</sup>

Jurnal Pembiayaan Mudharabah

1 Juni	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Kas	Rp 350.000.000,-	Rp 350.000.000,-
--------	-------------------------------------	------------------	------------------

Pembiayaan *mudharabah* dalam bentuk aktiva non-kas seperti mesin seharga Rp 200.000.000,- sementara menurut nilai wajar tersebut harganya Rp 180.000.000,- Biaya akad 1.800.000,- maka pencatatan yang dilakukan pada akad adalah :

Jurnal Saat Akad *Mudharabah*

1 Juni 2009	Pembiayaan <i>Mudharabah</i> Kerugian Penurunan Nilai Mesin <i>Mudharabah</i>	Rp 180.000.000,- Rp 2.000.000,-	Rp 200.000.000,-
----------------	---	------------------------------------	------------------

Jurnal untuk Biaya Akad

1 Juni 2009	Beban Akad <i>Mudharabah</i> Kas	Rp 1.800.000,-	Rp 1.800.000,-
----------------	-------------------------------------	----------------	----------------

Beban akad menjadi tanggungan *shahibul maal* (pemilik dana). Apabila beban akad menjadi tanggungan *mudharib* maka bank akan mencatat sebagai berikut :

---

<sup>3</sup>Sri Dewi Rezeki, (Pegawai pada PT, Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru), Wawancara, Pekanbaru, 3 Maret 2010.

1 Juni 2009	Kas Pendapatan akad <i>Mudharabah</i>	Rp 1.800.000,-	Rp 1.800.000,-
----------------	--	----------------	----------------

Jurnal saat Bagi Hasil *Mudharabah*

31 Des 2009	Piutang Pendapatan Bagi Hasil Pendapatan Bagi hasil <i>Mudharabah</i>	Rp40.000.00,-	Rp40.000.00,-
-------------------	--	---------------	---------------

Jurnal Saat terjadi Kerugian Pembiayaan *mudharabah*

31 Des	Kerugian pembiayaan <i>mudharabah</i> Pembiayaan <i>Mudharabah</i>	RP 5.760.000,-	Rp 5.760.000,-
-----------	---	----------------	----------------

Kerugian pembiayaan tersebut apabila tidak dicatat oleh Bank Riau Kepri Syari'ah pekanbaru maka laba perusahaan akan dicatat terlalu besar akibatnya akan berpengaruh terhadap besarnya nilai bagi hasil untuk kedua pihak, terutama jika menggunakan metode *profit sharing*. Namun apabila menggunakan metode *revenue sharing* pencatatan kerugian *mudharabah* tersebut tidak berpengaruh terhadap besarnya nilai bagi hasil untuk kedua belah pihak.

## **B. Penerapan Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah* Menurut Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan No :105**

Berdasarkan PSAK No : 101 Tahun 2009 tentang penyajian laporan keuangan syari'ah dinyatakan bahwa laporan keuangan yang lengkap terdiri atas komponen-komponen berikut ini :

### **a. Neraca**

Neraca entitas syari'ah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai posisi keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar. Neraca minimal mencakup pos-pos berikut :

1. kas dan setara kas;
2. asset keuangan;
3. piutang usaha dan piutang lainnya;
4. persediaan;
5. investasi yang diperlakukan menggunakan metode ekuitas;
6. aset tetap;
7. aset tidak berwujud;

#### b. Laporan Laba Rugi

Laporan laba rugi entitas syari'ah disajikan sedemikian rupa yang menonjolkan berbagai unsur kinerja keuangan yang diperlukan bagi penyajian secara wajar.

Laporan laba rugi minimal mencakup pos-pos berikut :

1. pendapatan usaha;
2. bagi hasil untuk pemilik dana;
3. beban usaha;
4. laba atau rugi usaha;
5. pendapatan dan beban non usaha;
6. laba atau rugi dari aktivitas normal;
7. beban pajak; laba atau rugi untuk periode berjalan;

Jika terdapat pendapatan non-halal maka pendapatan tersebut tidak boleh disajikan dalam laporan laba rugi entitas syari'ah maupun laba rugi konsolidasian entitas konvensional yang mengonsolidasikan entitas syari'ah. Informasi

pendapatan non-halal tersebut disajikan dalam laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan.

#### c. Laporan Arus Kas

Laporan arus kas disusun berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan dalam PSAK terkait.

#### d. Laporan Perubahan Ekuitas;

Entitas syari'ah harus menyajikan laporan perubahan ekuitas sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan:

1. Laba atau rugi bersih priode yang bersangkutan ;
2. Setiap pos pendapatan dan beban, keuntungan atau kerugian beserta jumlahnya yang berdasarkan PSAK terkait diakui secara langsung dalam ekuitas;
3. Pengaruh kumulatif dari perubahan kebijakn akuntansi dan perbaikan terhadap kesalahan mendasar sebagaimana diatur dalam PSAK terkait ;
4. Transaksi modal dengan pemilik dan distribusi kepada pemilik;
5. Saldo akumulasi laba atau rugi pada awal dan akhir priode serta perubahannya;
6. Rekonsiliasi antara nilai tercatat dari masing-masing jenis modal saham, agio, dan cadangan pada awal dan akhir priode yang mengungkapkan secara terpisah setiap perubahan.

Perubahan ekuitas entitas syari'ah menggambarkan peningkatan atau penurunan asset bersih atau kekayaan selama priode bersangkutan berdasarkan

prinsip pengukuran tertentu yang dianut dan harus diungkapkan dalam laporan keuangan.

e. Laporan Sumber dan Penggunaan Dana Zakat

Entitas syari'ah menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana zakat sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan ;

1. Dana zakat berasal dari wajib zakat(muzakki)
  - i.zakat dari dalam entitas syari'ah
  - ii. zakat dari pihak luar entitas syari'ah
2. penggunaan dana zakat melalui lembaga amil zakat untuk:
  - i.fakir
  - ii.miskin
  - iii. *riqab*
  - iv. orang yang terlilit utang (gharim)
  - v. *muallap*
  - vi. *fisabilillah*
  - vii.orang yang dalam perjalanan(ibnu sabil)
  - viii. amil
3. kenaikan atau penurunan dana zakat
4. saldo awal dana zakat
5. saldo akhir dana zakat

f. . Laporan sumber dan penggunaan dana *Qardun Hasan*

Entitas menyajikan laporan sumber dan penggunaan dana kebajikan sebagai komponen utama laporan keuangan, yang menunjukkan :

1. Sumber dana kebajikan berasal dari penerimaan ;
  - a.infaq
  - b.sedekah
  - c.hasil pengelolaan waqaf sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku
  - d.pengembalian dana kebajikan dana produktif
  - e.denda
  - f.pendapatan non- halal
2. Penggunaan dana kebajikan untuk
  - a. dana kebajikan produktif
  - b. sumbangan
  - c. penggunaan lainnya untuk kepentingan umum
3. Kenaikan atau penurunan sumber dana kebajikan
4. Saldo awal dana penggunaan dana kebajikan
5. Saldo akhir dana penggunaan dana kebajikan

Penerimaan dana kebajikan oleh entitas syari'ah diakui sebagai kewajiban paling likuid dan diakui sebagai pengurang kewajiban ketika disalurkan. Penerimaan non halal adalah semua penerimaan dari kegiatan yang tidak sesuai dengan prinsip syari'ah antara lain jasa giro atau bunga yang berasal dari bank konvensional.

g.Catatan atas laporan keuangan.

Catatan atas laporan keuangan harus disajikan secara sistematis. Setiap pos dalam neraca, laporan laba rugi dan laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, laporan sumber dana dan penggunaan dana zakat, dan laporan penggunaan dana

kebijakan, harus berkaitan dengan informasi yang terdapat dalam catatan atas laporan keuangan. Catatan atas laporan keuangan mengungkapkan ;

1. Informasi tentang dasar penyusunan laporan keuangan dan kebijakan akuntansi yang dipilih dan diterapkan terhadap peristiwa dan transaksi yang penting
2. Informasi yang diwajibkan dalam PSAK tetapi tidak disajikan di neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, laporan perubahan ekuitas, sumber dan penggunaan zakat, dan laporan penggunaan dana kebajikan
3. Informasi tambahan yang tidak disajikan dalam laporan keuangan tetapi diperlukan dalam rangka penyajian secara wajar.

Berdasarkan prinsip-prinsip akuntansi syariah perhitungan dilakukan berdasarkan distribusi bagi hasil. Untuk itu pencatatan dan penyajian transaksi yang terjadi khususnya dalam hal pengakuan pendapatan, harus tepat waktu begitu juga terhadap beban-beban yang terjadi selama periode berjalan. Penyajian pendapatan dan beban yang tepat, akan mempengaruhi besarnya nilai bagi hasil yang harus diperhitungkan oleh bank dan dibagikan kepada nasabah (*Mudharib*).

Untuk pengukuran dan pengakuan beban berdasarkan laporan keuangan per 30 Juni 2009, yaitu neraca dan laporan rugi laba terlihat bahwa perusahaan menggunakan metode *Wagila (accrual Basis)*. Seperti terlihat pada neraca dimana tercantum beban yang masih harus dibayar yang menunjukkan bahwa cara pencatatan tersebut merupakan metode *accrual Basis*.<sup>4</sup>

---

<sup>4</sup>Anthon,(Pegawai pada PT, Bank Riau Cabang Syariah Pekanbaru), Wawancara, Pekanbaru, 22 Februari 2011



Pada dasarnya penyajian beban yang diterapkan oleh PT. bank Riau Kepri Syariah pekanbaru tidak memiliki permasalahan yang berarti karena telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syariah dan sesuai dengan PSAK

### **Penyajian Pada Laporan Keuangan**

Akuntansi Syariah memiliki prinsip-prinsip akuntansi yang berbeda dengan prinsip akuntansi konvensional. Prinsip akuntansi syariah menyatakan bahwa sesuai dengan Al-Quran dan hadist bahwa setiap usaha yang diperoleh keuntungan maka wajib usaha tersebut menyisihkan 2.5% dari keuntungannya untuk dibayarkan sebagai zakat yang bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan umat sebagai suatu tujuan utama akuntansi Islam maupun lembaga keuangan syari'ah.

Dengan melihat laporan keuangan pada laporan Rugi Laba yang diterbitkan Bank Riau Syari'ah Pekanbaru per tanggal 30 Juni 2009, dapat diketahui bahwa laporan rugi laba yang diterbitkan Bank Riau Syariah Pekanbaru belum menggambarkan posisi keuangan yang wajar. Hal ini dapat dilihat dari tidak disajikannya *beban zakat* pada pos beban, sedangkan zakat ini wajib dikeluarkan atau dikurangi dari pendapatan sebelum pajak sebagaimana dinyatakan dalam prinsip-prinsip akuntansi syari'ah dan ini adalah salah satu pranata yang membedakan nya dengan bank konvensional. Berdasarkan PSAK No 101 tahun 2009 beban pajak juga menjadi pengurang bagi hasil terhadap laba yang diperoleh perusahaan.

Menurut ketentuan fiqih zakat dinyatakan, bahwa zakat yang harus dibayarkan jika telah sampai nisabnya berdasarkan tahun Hijriah adalah 2,5% sedangkan jika berdasarkan tahun Masehi sebesar 2,575%.<sup>5</sup>

Pada Laporan laba rugi per 30 Juni 2009, Bank Riau Syari'ah Pekanbaru memperoleh laba sebesar Rp 370.000.000,-. Namun demikian pada laporan laba rugi perusahaan tidak terlihat adanya beban zakat yang menjadi pengurang terhadap laba sebelum pajak. Seharusnya sebagai sebuah perusahaan lembaga keuangan syariah Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru wajib menunaikan kewajibannya. Tapi, Jika rugi tidak ada kewajiban zakat terhadap laba.

Bank Riau Syari'ah Pekanbaru membuat laporan berdasarkan priode tahun masehi, sehingga besarnya zakat yang harus dibayarkan adalah 2,575%. Berdasarkan hasil perhitungannya diketahui bahwa zakat yang harus dibayar oleh Bank Riau Syari'ah Pekanbaru adalah  $\text{Rp } 370.000.000,- \times 2,575\% = \text{Rp } 9.527.500,-$ . Maka pencatatan yang harus dilakukan adalah :

#### Jurnal Pencatatan Biaya Zakat

Juni 2009	Laba (Rugi) sebelum pajak Biaya Zakat	Rp9.527.500,-	Rp 9.527.500,-
-----------	--	---------------	----------------

Dengan adanya pencatatan tersebut maka biaya zakat yang seharusnya dikeluarkan Bank Riau Syari'ah Pekanbaru akan mengurangi jumlah laba (Rugi) sebelum pajak sebesar Rp 9.527.500,-. Untuk mengoreksi laporan rugi laba tersebut dan mencatat Biaya Zakat sebagai pengeluaran Bank Raiu Syari'ah Pekanbaru, maka dibuat Jurnal koreksi sebagai berikut :

---

<sup>5</sup>Syahatah Husayn, *Akuntansi Zakat: Panduan praktis penghitungan zakat kontemporer*, (Jakarta : Pustaka Progressif, 2004) h.196.

Juni 2009	Biaya Zakat Laba (Rugi) sebelum pajak	Rp 9.527.500,-	Rp 9.527.500,-
--------------	--	----------------	----------------

disepakati dan kerugian yang terjadi diakui pada priode terjadinya kerugian tersebut dan mengurangi pembiayaan *mudharabah*.

Seharusnya kerugian pembiayaan tersebut dicatat pada priode 2009 dengan jurnal sebagai Berikut :

Jurnal Mencatat Kerugian

Juni 2009	KerugianPembiayaan Mudharabah Pembiayaan Mudharabah	Rp 6.500.000,-	Rp6.500.000,-
--------------	--	----------------	---------------

Berdasarkan uraian diatas, maka dapat disimpulkan bahwa dalam hal penyajian laba (Rugi) Bank Riau Kepri Syari'ah Pekanbaru telah sesuai dengan prinsip-prinsip akuntansi syari'ah seperti tercantum dalam PSAK 105 tahun 2009 tentang Akuntansi Pembiayaan *Mudharabah*, hanya saja masih terdapat kesalahan dalam pencatatan beban kerugian dan beban zakat yang belum dikurangkan pada saat priode terjadinya.

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian-uraian dari hasil penelitian dan pembahasan yang telah dikemukakan, maka dapatlah diambil kesimpulan sebagai berikut :

1. Secara Umum Penerapan Akuntansi Mudharabah di Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah telah sesuai dengan teori. Hanya saja ada kesalahan dalam kerugian pembiayaan *mudharabah* yang tidak dikurangi oleh *mudharib* dan Bank Riau Kepri Cabang Syari'ah Pekanbaru, dalam hal ini akan merugikan pihak bank sendiri. Perhitungan bagi hasil terhadap pembiayaan dan pendanaan *mudharabah* yang sering dipakai oleh Bank Riau Syariah Pekanbaru adalah *Revenue Sharing* terutama untuk pembiayaan *mudharabah* karena tingkat resiko yang cukup tinggi apabila memakai metode *Profit Sharing*.
2. Penyajian laporan keuangan yang diterbitkan Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru berdasarkan hasil penelitian belum sesuai dengan PSAK No:105 Tahun 2009, hal ini terlihat dari penyajian beban dimana bank tidak membebankan biaya Zakat yang merupakan salah satu prinsip utama dalam akuntansi syariah sebagai pengurang terhadap laba sebelum pajak. Bank Riau Syariah Pekanbaru membuat laporan berdasarkan priode tahun masehi.

## B. Saran

Berdasarkan analisis yang dilakukan, ada kelemahan-kelemahan pada Penerapan akuntansi pembiayaan *mudharabah* oleh karena itu saran-saran yang dapat diberikan antara lain :

1. Perhitungan metode bagi hasil sebaiknya pihak Bank Riau Kepri Syariah Pekanbaru sebaiknya memakai *profit sharing*, hal ini lebih menguntungkan kedua belah pihak, baik pihak bank sendiri maupun pihak nasabahnya.
2. Pihak Bank Riau Kepri Sebaiknya mencatat kerugian dalam hal pembiayaan *mudharabah* pada saat terjadinya kerugian, supaya tidak terlalu besar kerugian yang akan ditanggung oleh pihak bank pada saat priode bagi hasil.
3. Pihak Bank Riau Kepri Syariah agar menyajikan laporan keuangan lebih berpedoman terhadap Pernyataan Standar Akuntansi Keuangan yang berlaku. Seperti hal nya ketika terjadi kerugian di catat pada priode terjadinya kerugian dan adanya beban zakat yang musti dikeluarkan oleh pihak Bank itu sendiri.
4. Direkomendasikan bagi peneliti lainnya yang berminat melakukan kajian pada objek yang sama untuk melakukan kajian tentang kasus kontrak pembiayaan *Mudharabah* yang bermasalah lainnya.

## DAFTAR PUSTAKA

- Abdur Rahman, *Muamalah*, (Jakarta : Raja Grapindo, 1996).
- Adiwarman Karim, *Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2008).
- \_\_\_\_\_, *Bank Islam : Analisis Fiqih dan Keuangan*, (Jakarta : PT Raja Grapindo Persada, 2004).
- Departemen Agama RI, *Al-Qur'an Terjemahannya*., (Jakarta :Syamil Qur'an, 2007).
- Fitri Yasmin. *Analisis Sistem Bagi Hasil Pada Bank Riau Syari'ah*, (Pekanbaru : 2007).
- Fatwa Dewan Syariah Nasional nomor 07/ DSN-MUI/IV/2002 tentang Pembiayaan Mudharabah.
- Hasbi Ramli. *Teori dasar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta : Renaisan, 2005).
- Ikatan Akuntan Indonesia, *PSAK No 105 Standar Akuntansi Keuangan*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009).
- \_\_\_\_\_, *Standar Akuntansi Keuangan*, Jakarta : (Salemba Empat, 2004).
- Iwan Triyuwono. *Perspektif Metodologi Teori Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta : Raja Grapindo Persada, 2006).
- Kasmir, *Bank dan Lembaga Keuangan Lainnya*, (Jakarta : PT. Raja Grapindo Persada, 2001).
- Mawardi. *Ekonomi Islam*, (Pekanbaru : Alaf Riau, 2007).
- Muhammad. *Sistem dan Prosedur Operasional Bank Islam*, (Yogyakarta : UUI Press, 2000).
- \_\_\_\_\_, *Manajemen Bank Syari'ah*, (Yogyakarta : UUP AMP YKPN, 2004).
- \_\_\_\_\_, *Pengantar Akuntansi Syari'ah*, (Jakarta : PT Salemba Empat Patria, 2002).

Muhammad Safi'I Antonio. *Bank Syari'ah dari Teori ke Praktek*, (Jakarta : Gema Insani Press, 2002).

Muljaman. *Penerapan Metode Bagi Hasil Mudharbah dalm menentukan Tingkat Pendapatan perusahaan Bank Syariah Mandiri*, (Pekanbaru : Skripsi FEUNRI, 2005).

Slamet Wiyono. *Cara Mudah Memahami Akuntansi Perbankan Syari'ah Berdasarkan PSAK dan PAPSI*, (Jakarta : PT Grasindo, 2005).

Sopyan Harahap. *Akuntansi Islam*, Jakarta : Bumi Aksara, 2004).

Sri Neva Lestari. *Penerapan Pernyataan Akuntansi Keuangan Nomor 102 terhadap Akuntansi Murabahah pada PT Bank Riau Syari'ah*, (Pekanbaru : Skripsi FSUIN, 2010).

Sri Nurhayati Dkk. *Akuntansi Syari'ah di Indonesia*, (Jakarta : Salemba Empat, 2009).